



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun.

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



a. Tugas Pokok.

Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan yang meliputi menyusun, melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan serta barang milik daerah.

b. Fungsi Pokok.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Penetapan upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
3. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

B. Struktur Organisasi

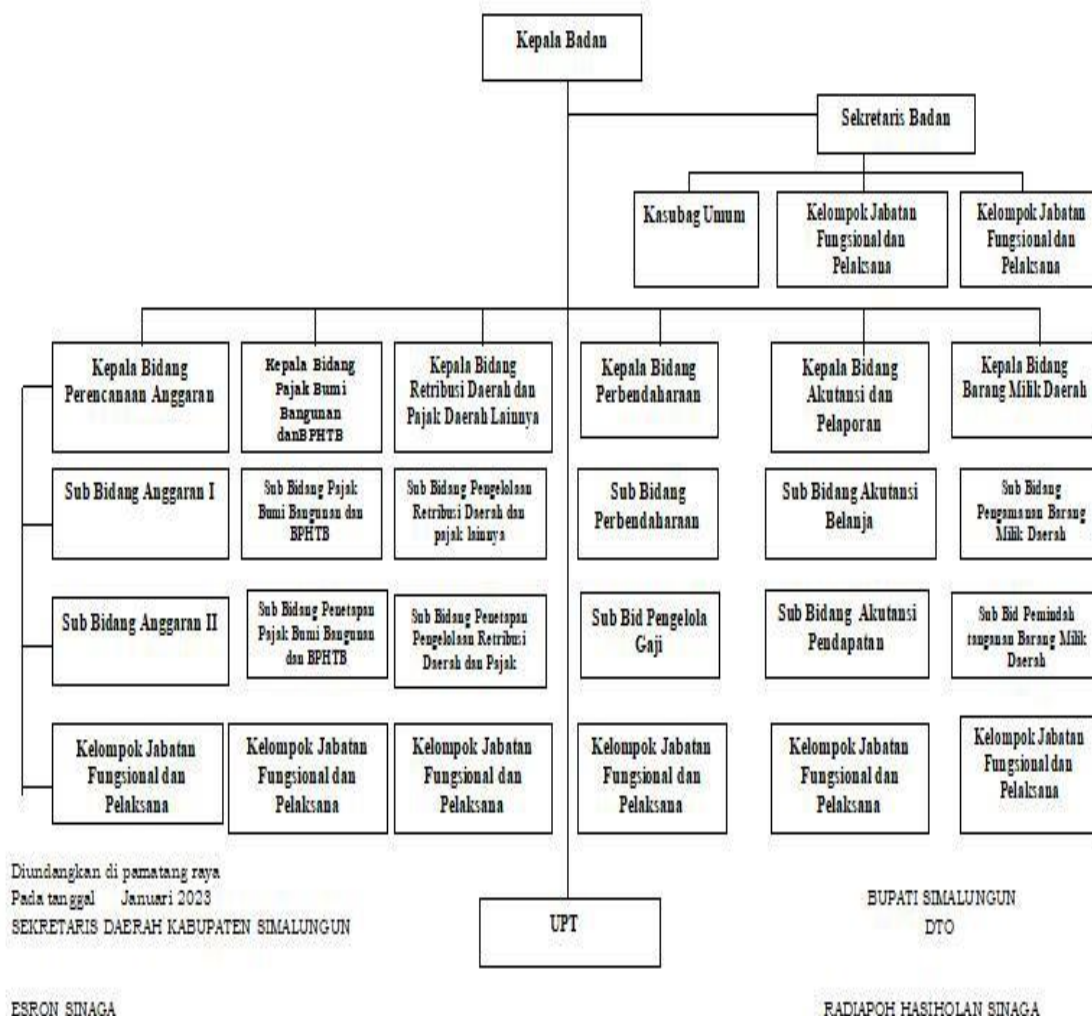
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.



STRUKTUR ORGANISASI BPKPD





C. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

D. Isu Strategis

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good dan Clean Governance*, dan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta dalam melaksanakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut :

1. Kepatuhan pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah
2. Kepatuhan pelaksanaa laporan pertanggungjawaban OPD sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
6. Peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.



7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu dilaksanakan.
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak yang belum patuh terus dilakukan melalui uji potensi dan pengawasan di lapangan;
9. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan.

Kemudian dalam rangka untuk tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD untuk rekonsiliasi SPJ Fungsional.
2. Melakukan sinkronisasi laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD secara berkala.
3. Melakukan penataan barang sesuai dengan penatausahaan BMD.
4. Melakukan penyesuaian Kodefikasi BMD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
5. Mengembangkan Sistem Aplikasi yang mengakomodasi penyesuaian kodefikasi baru dan kelembagaan baru.
6. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bimbingan teknis untuk aplikasi SIMBADA dan SIPP AKSI bagi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pengguna/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
7. Melakukan koordinasi rutin antar bidang di BPKPD untuk mengantisipasi/



pemetaan permasalahan dan segera mencari solusinya.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip melakukan pengelolaan APBD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun disusun dengan langkah-langkah yang sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai, maka disusunlah Rencana Strategi (RENSTRA) yang sejalan dan mendukung pelaksanaan program kerja tahunan.

1. Visi dan Misi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun bertujuan mewujudkan visi Kabupaten Simalungun, yaitu: “Rakyat Harus Sejahtera.

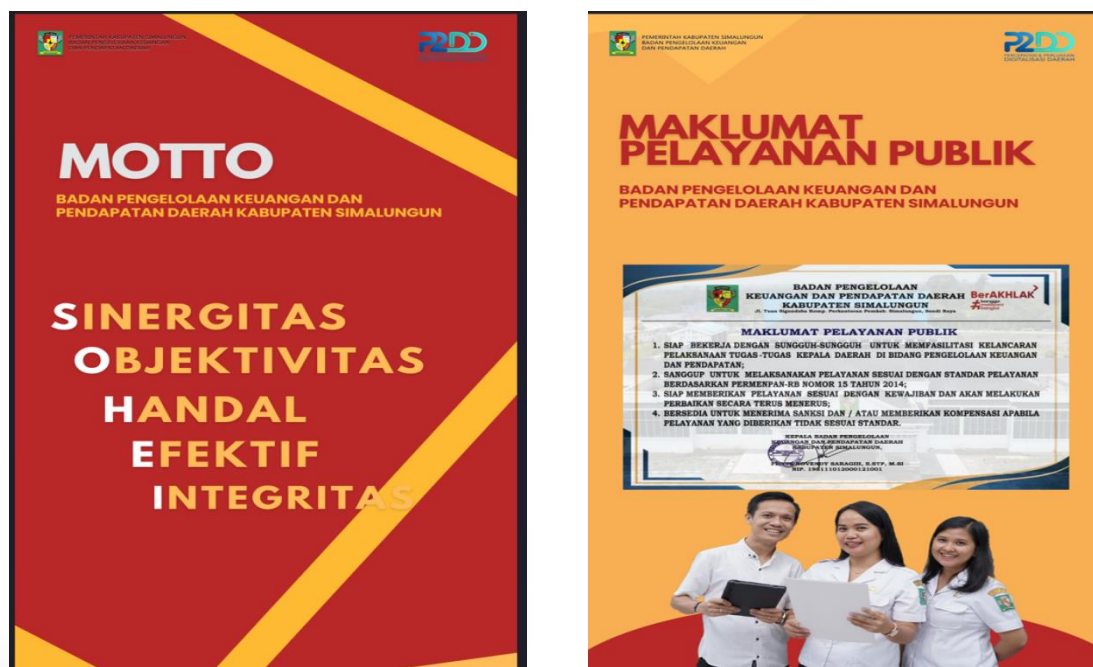
Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merupakan pencapaian visi tersebut di atas. Kabupaten Simalungun mengusung 10 Misi dalam mewujudkan visi “Rakyat Harus Sejahtera”, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun mengemban tiga (3) misi yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
3. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)



Gambar 2.1 Visi dan Misi BPKPD

BPKPD juga memiliki motto dalam melaksanakan pelayanannya yaitu SOHEI, Sinergitas, Objektivitas, Handal, Efektif, Integritas. Selanjutnya maklumat BPKPD dalam melaksanakan pelayanannya yaitud apat dilihat pada gambar beikut:



Gambar 2.2 Motto dan Maklumat Pelayanan BPKPD



2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya (Strategi, Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam formulir Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

Sasaran dan indikator kinerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Profesional	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran (Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Keuangan dan Aset dengan Baik)
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ratio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures), Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang optimal guna peningkatan pembangunan daerah	meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur yang digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, tolak ukur kinerja aparatur.	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah
4	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Pajak dan Retribusi.
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	Peningkatan Pajak Daerah	Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.
6	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja	Pelaksanaan Diklat dan Sosialisasi terkait Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan Daerah.	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Meningkatkan sarana prasarana aparatur, administrasi perkantoran, kualitas kelembagaan serta kualitas data dan perencanaan
8	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan akan sumber daya manusia yang handal dengan mengikuti diklat-diklat fungsional yang diselenggarakan pihak lain maupun dengan menyelenggarakan diklat dilingkungan Kabupaten Simalungun.	Meningkat Kualitas Layanan dan Inovasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal.



Pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2022-2026 terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	94,80%
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	74,62%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,84%
		2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,85%
		3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,75%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100%
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA
6	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	85%
8	Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	85%
9	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	85%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja organisasi merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun sebagai berikut :



Tabel 3.1
Capaian Kinerja

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	94,80%	90,17%	95,12%
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	74,62%	92%	123,29%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,84%	27,25%	230,15%
		2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,85%	57,34%	82,09%
		3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,75%	4,59%	122,40%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	Belum ada Opini	Belum ada Opini
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100%	9,83%	9,83%
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA
6	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100,00%
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	85%	113,97%	134,08%
8	Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	85%	90%	105,88%
9	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	85%	95%	111,76%

Sumber Data: Rencana Strategis BPKPD

Dalam pemenuhan pencapaian kinerja perlu dilakukan penilaian kerja, baik dan terdapat indikator-indikator penilaian yang ditetapkan yang dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran kinerja yang menjadi perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.



3.1.2 Analisis capaian Kinerja

3.1.2.1. Sasaran strategis pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pemenuhan sasaran strategis pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan memenuhi capaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu daya serap anggaran dan persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset.

Sasaran 1
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator 1
Daya Serap Anggaran

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Daya Serap Anggaran

Indikator kinerja daya serap anggaran dilaksanakan untuk melihat capaian kinerja perangkat daerah dalam menyerap/ realisasi anggaran yang telah disusun pada APBD Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	94,80%	90,17%	95,12%



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Daya Serap Anggaran Tahun 2021-2024

Anggaran belanja Kabupaten Simalungun Rp. 2.947.435.592.653,00 dan telah realisasi sebesar Rp. 2.657.709.012.035,83 atau 90,17%. Dengan demikian, Indikator kinerja daya serap anggaran dengan target 94,17% telah direalisasikan 90,17% sehingga capaian kinerja menjadi 95,12%.

Tabel 3.3
Daya Serap Anggaran Kabupaten Simalungun TA.2022-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	89,47%	88,92%	94,94%	94,80%	90,17%	95,12%

Daya serap anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dari tahun ke tahun meningkat, Tahun 2023 mencapai 94,94% dan menurun di tahun 2024 sebesar 90,17%. Hal ini disebabkan kemampuan perangkat daerah yang belum mematuhi petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yaitu Dinas Keluarga Berencana dan Dinas Pertanian.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Daya Serap Anggaran Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Tingkat kemajuan indikator kinerja daya serap anggaran yang dibandingkan dari realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 mencapai 91,42%. Dengan tingkat kemajuan tersebut BPKPD dikategorikan berhasil memenuhi target dimaksud.



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Daya Serap Anggaran

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana	Tingkat Kemajuan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	90,17%	98,63%	91,42%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Daya Serap Anggaran Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Sasaran kinerja penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja daya serap anggaran tidak memiliki perbandingan standar secara Provinsi maupun Nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar provinsi dan nasional

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	91,42%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	95,12%



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Daya Serap Anggaran serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6

Analisis Penyebab keberhasilan Indikator Daya Serap Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	95,12%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Daya Serap Anggaran didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Daya Serap Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :



$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Daya Serap Anggaran

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realisasi anggaran (RARO)	capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)- RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	91,12%	90,17%	98,96%	98.935.989.311,00	90.103.785.186,00	91,07%	97.904.501.274,94	7.800.716.088,94	7,88%

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Kinerja Daya Serap Anggaran.

Pelaksanaan indikator kinerja daya serap tinggi telah didukung dengan penggunaan sistem aplikasi yang berbasis online. Sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat untuk menjangkau perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan juga pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) aplikasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2024 menggunakan SIPD secara penuh dari perencanaan hingga pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.



Tabel 3.8

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator Daya Serap Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daya Serap Anggaran	95,12%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Daya Serap Anggaran didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

Sasaran 1

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator 2

Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik

Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola aset dengan baik pada perjanjian kinerja dengan target 74,62% dan telah realisasi 92% sehingga capaian kinerja menjadi 123,29%.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik.

Indikator perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik, dilihat dari perangkat daerah mampu menyajikan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan. BPKPD



sebagai sekretariat pengelola aset melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan aset dengan cara melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, focus grup diskusi dan rekonsiliasi kepada seluruh bendahara barang/ pengurus barang pada setiap Perangkat Daerah.

Pelaksanaan rekonsiliasi aset menjadi penilaian persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik. Pelaksanaan rekonsiliasi aset dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2022-2024 dengan jadwal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Pengurus Barang Perangkat Daerah dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dilakukan sebanyak 2 kali (setiap semester).
2. Rekonsiliasi Bidang BMD dengan Pengurus Barang Perangkat Daerah dilakukan sebanyak 4 kali (4 triwulan).
3. Rekonsiliasi Bidang BMD dengan Bidang Akuntansi dilakukan sebanyak 2 kali (setiap semester)

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	74,62%	92,00%	123,29%



Perangkat Daerah yang mampu mengelola aset dengan baik sesuai pelaksanaan rekonsiliasi yang ditetapkan adalah sebanyak 60 Perangkat Daerah, dari total 65 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun.

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik Tahun 2021-2024.

Indikator Kinerja persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola aset dengan baik tahun 2024 dengan target 74,62% telah terrealisasi sebanyak 92% dengan capaian kinerja sebesar 123.29%. Dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam mencapai indikator persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola aset dengan baik sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Tahun 2021-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pemujung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	52,24%	59,70%	67,16%	74,62%	92,00%	123,29%

Indikator Kinerja persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola aset dengan baik juga terlihat dari hasil *Monitoring Core Preventing* (MCP-KPK) yang diselenggarakan setiap tahunnya. Hasil *Monitoring Core Preventing* (MCP-KPK) tahun



2021 sebesar 15%, tahun 2022 sebesar 73%, tahun 2023 sebesar 74%, tahun 2024 sebesar 64%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik Tahun 2024 dengan Target Akhir rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2026 ditetapkan Target Akhir sebesar 89.55% dan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 92% maka tingkat kemajuan mencapai 102,74%. Hal ini disebabkan, Perangkat Daerah dibekali dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan FGD serta rekonsiliasi Barang Milik Daerah.

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	92,00%	89,55%	102,74%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tidak



ada perbandingan dengan standar Nasional maupun Provinsi.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	92,00%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	123,29%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam upaya pencapaian Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik perlu dilakukan Analisa keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan selanjutnya.



Tabel 3.13

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang Dilakukan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	74,62%	92,00%	123,29%	Keberhasilan	Kualitas Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik tetap lebih ditingkatkan.

Berikut upaya pencapaian Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik dilaksanakan dengan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang rutin dilaksanakan. Pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dilakukan antara Pengurus Barang dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pelaksanaan ini dilaksanakan untuk mendorong Pejabat yang berwenang yaitu Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai pejabat yang menyajikan laporan keuangan dan asset memahami betul asset yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



Gambar 3.1 Rekonsiliasi Aset Pengurus Barang dengan Bidang BMD

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 001 / 181 / 2025

Pada hari ini secara resmi telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan Laporan Realisasi Anggaran dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengurusan yang disusun untuk periode Januari 2024 s.d Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

I. Nama : Endang Efendi Tanjung
NIP : 19841104 201212 1 005
Jabatan : Pengurus Barang
Daerah ini bertindak untuk dan atas nama pengurus barang pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : Ludawaty Simandjati, SH
NIP : 19690567 200801 2 003
Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Daerah ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Penatausahaan BMD, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Realisasi dengan Laporan Realisasi Anggaran dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengurusan yang disusun untuk periode Januari 2024 s.d Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Data BMD:

Rincian terlampir:

No	Aksi/Revisi	Saldo Awal	Saldo Akhir
A. ASET LANCAR			
1	Persediaan	923.100,00	-
B. ASET TETAP			
1	Tanah	241.553.480,00	-
2	Peralatan dan Meubel	2.798.134.877,04	-
3	Gedung dan Bangunan	3.911.606.114,00	-
4	Jalan Irigasi dan Jembatan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	49.172.500,00	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
C. ASET LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	-	-
2	Aset Lain-Lain	368.876.230,96	-
D. SUB JUMLAH (A+B+C)			
		7.370.666.302,00	7.369.743.203,00
E. Ekstranetablis		50.026.625,00	-
F. TOTAL (D+E)		7.420.692.927,00	7.419.769.827,00

1. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD telah ditunjukkan Laporan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau dalam Lampiran (Laporan Akumulasi dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Berita Acara ini, antara lain:

1. Laporan Akumulasi
2. Laporan Persediaan (Stockopment)
3. Berita Acara Stockopment
4. Laporan Barang Milik Daerah

Berita Acara ini dibuat untuk bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, dan apabila ditemukan hal terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PENGURUS BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Endang Efendi Tanjung
NIP. 19841104 201212 1 005

PIHAK KEDUA
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ludawaty Simandjati, SH
NIP. 19690567 200801 2 003

Gambar 3.2 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Pengurus Barang Perangkat Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan



5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator

Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik dimaksudkan untuk menilai seberapa efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari jumlah penggunaan alokasi anggaran dibandingkan capaian kinerja dikurangi realisasi capaian kinerja. Dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.14

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik.

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realisasi anggaran (RARO)	capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik	74,62%	92,00%	123,29%	3.566.834.500,00	3.020.034.647,00	84,67%	3.601.281.540,83	581.246.893,83	16,30%

Perangkat Daerah selain melaksanakan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan juga melaksanakan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan Bidang Barang Milik Daerah yang dilakukan sebanyak 4 kali atau setiap triwulan, dapat dilihat sebagai berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



Gambar 3.3 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Aset

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 300 / RA / PRAJA 2024**

Pada hari ini sesuai tanggal sekian bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Kecamatan Bertan, Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan:

A. Nama : Ruslan Edandi Tanjung
NIP : 19841104 201212 1 005
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus barang pada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

B. Nama : Richarda Sanga, SH
NIP : 19850804 201505 1 002
Jabatan : Kepala Bidang BMD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Pemertanahan BMD Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Realisasi dengan Laporan Realisasi Anggaran, dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna yang disusun untuk periode Januari 2024 s.d Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Data BMD:

Menyatakan sebagai berikut:

No	Akron Revisi	Saldo Awal	Saldo BMD 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024	Saldo Akhir
A	ASET LANCAR	923.100,00	-	-
1	Persediaan	923.100,00	-	-
B	ASET TETAP	7.000.866.972,04	-	7.000.866.972,04
1	Tanah	241.553.480,00	-	241.553.480,00
2	Peralatan dan Meubel	2.798.124.877,04	-	2.798.124.877,04
3	Ordung dan Bangunan	3.911.606.114,00	-	3.911.606.114,00
4	Jalan, Trotoar dan Jembatan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	49.172.500,00	-	49.172.500,00
6	Sumberdaya Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAKSANA	366.876.230,96	-	366.876.230,96
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lintas Lintas	366.876.230,96	-	366.876.230,96
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	7.370.666.302,00	-	7.369.743.202,00
E	Ekstrakurikuler	50.026.423,00	-	50.026.423,00
F	TOTAL (D+E)	7.420.692.725,00	-	7.419.769.625,00

1. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Lampiran (Lampiran Aktual dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Berita Acara ini, antara lain:

1. Laporan Aktual
2. Laporan Persediaan (Stokoposisi)
3. Berita Acara Stokoposisi
4. Laporan Barang Milik Daerah

Berikut ini Berita Acara ini dibuat untuk Satuan Penyelenggaraan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakakuratan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU
PENGURUS BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG BMD
KABUPATEN SIMALUNGUN**

Ruslan Edandi Tanjung
NIP. 19841104 201212 1 005

Richarda Sanga, SH
NIP. 19850804 201505 1 002

Gambar 3.4 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Pengurus Barang Perangkat Daerah dan Bidang BMD Kab. Simalungun



6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Atapun Kegagalan Pencapaian Kinerja Persentase Perangkat

Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik.

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik dengan capaian kinerja 123,29% dan capaian program 100% dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.15

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik	123,29%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset dengan baik selain rutin dilaksanakan dengan rekonsiliasi BMD jugadidukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

Pelaksanaan Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset dengan baik didukung oleh system informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi. Pelaksanaan pelaporan Barang Milik Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga didukung dengan rekonsiliasi antara Bidang BMD dan Bidang Akuntansi sebagai bidang yang melaksanakan tugas menyajikan Laporan Keuangan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rekonsiliasi dilaksanakan 2 kali yaitu setiap semester dalam tahun berjalan. Berikut gambar pelaksanaan rekonsiliasi:

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR : 900 / 305 / 2024				
Pada hari ini KOMP tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Perhubungan , kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
I. Nama	: Richardo Sinaga, SH			
NIP	: 198508042015051002			
Jabatan	: Kabid BMD Kab. Simalungun			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus barang pada Bidang BMD untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;				
II. Nama	: David Sahruddin S. Garingging, SE			
NIP	: 198101052009031008			
Jabatan	: Kabid Akuntansi Kab. Simalungun			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Bidang Akuntansi , untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;				
Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Realisasi dengan Laporan Realisasi Anggaran dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna yang disusun untuk periode Januari 2024 s.d Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:				
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMD:				
Rincian terlampir				
No	Aksi Neraca	Nilai BMD 1 Januari 2024 s.d 30 Juni 2024		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A	ASET LANCAR	13.458.816.361,18	-	13.558.234.361,18
1	Persediaan	13.458.816.361,18	-	13.558.234.361,18
B	ASET TETAP	5.535.212.247.003,89	-	5.535.212.247.003,89
1	Tanah	622.587.837.550,75	-	622.587.837.550,75
2	Peralatan dan Mesin	665.444.756.259,67	-	665.444.756.259,67
3	Gedung dan Bangunan	1.588.142.789.368,34	-	1.588.142.789.368,34
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.404.821.046.396,87	-	2.404.821.046.396,87
5	Aset Tetap Lainnya	232.316.502.348,51	-	232.316.502.348,51
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.899.318.079,75	-	21.899.318.079,75
C	ASET LAINNYA	189.492.169.792,36	-	189.492.169.792,36
1	Aset Tidak Berwujud			
2	Aset Lain-Lain	189.492.169.792,36		189.492.169.792,36
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	5.738.163.233.157,43	-	5.738.262.651.157,43
E	Eksrakontable			
F	TOTAL (D+E)	5.738.163.233.157,43	-	5.738.262.651.157,43
I. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan disajikan dalam lampiran (Laporan Akruai dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Berita Acara ini, antara lain:				
1. Laporan Akruai				
2. Laporan Persediaan (Stockopname)				
3. Berita Acara Stockopname				
4. Laporan Barang Milik Daerah				
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.				
PIHAK KESATU Kabid BMD Kab. Simalungun  Richardo Sinaga, SH NIP. 198508042015051002		PIHAK KEDUA Kabid Akuntansi Kab. Simalungun  David Sahruddin S. Garingging, SE NIP. 198101052009031008		

Gambar 3.5 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Bidang BMD Kab. Simalungun dan Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Simalungun.



3.1.2.2 Sasaran Strategis Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sasaran 2

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Indikator

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
1. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)
3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan dengan memenuhi 3 indikator kinerja yaitu :

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dengan rumus perhitungan yaitu

Jumlah Belanja di luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Jumlah APBD.

2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures).

Rumus perhitungan rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) dihitung dengan cara :

Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures
Jumlah APBD



3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.

Rumus perhitungan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya yaitu :

Nilai Realisasi SILPA

Total Belanja Anggaran Tahun sebelumnya

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja :

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,84%	27,25%	230,15%
2		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,85%	57,34%	82,09%
3		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,75%	4,59%	122,40%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2024 dilaksanakan untuk melihat capaian sasaran strategis koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah dari tahun 2021-2024. Dari tabel di bawah dapat di lihat, dari tahun 2021 hingga tahun 2024 peningkatan realisasi kinerja terhadap ketiga indikator kinerja sasaran strategis koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah



Tabel 3.17

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
			2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	10,51%	11,17%	11,50%	11,84%	27,25%	230,15%
2		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	49,46%	49,61%	50,78%	69,85%	57,34%	82,09%
3		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,21%	4,25%	4,00%	3,75%	4,59%	122,40%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada 3 diindikator kinerja dalam sasaran strategis koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah telah mencapai target pada indicator Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, namun untuk Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) belum mencapai tingkat kemajuan kinerja sebesar 81,91%.

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan RENSTRA

No	Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	27,25%	12,50%	218,00%
2		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	57,34%	70,00%	81,91%
3		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,59%	3,25%	141,23%



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

No	Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	27,25%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	230,15%
2		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	57,34%		82,09%
3		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,59%		122,40%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan indikator kinerja dan mendorong indikator kinerja untuk upaya dalam mencapai keberhasilan.



Tabel 3.20

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang Dilakukan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,84%	27,25%	230,15%	Keberhasilan	Kualitas mengelola Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	69,85%	57,34%	82,09%	Kegagalan (Tidak sesuai target dan realisasi)	Peningkatan Belanja Modal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,75%	4,59%	122,40%	Keberhasilan	Kualitas Mengelola Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dimaksudkan untuk menilai seberapa efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari jumlah penggunaan alokasi anggaran dibandingkan capaian kinerja dikurangi realisasi capaian kinerja. Dapat dilihat dari tabel berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

Tabel 3.21
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realiasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,17%	27,25%	243,96%	250.637.100,00	145.659.204,00	58,12%	611.446.819,61	465.787.615,61	185,84%
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	69,71%	57,34%	82,26%	98.333.800,00	34.321.000,00	34,90%	80.884.522,91	46.563.522,91	47,35%
	Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,25%	4,59%	108,00%	1.126.541.600,00	1.015.675.750,00	90,16%	1.216.664.928,00	200.989.178,00	17,84%

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah diperlukan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.22
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	230,15%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.
2		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	82,09%					
3		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	122,40%					



3.1.2.3 Sasaran Strategis Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sasaran 3
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator 1
Opini Laporan Keuangan

1. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan.

Sasaran Strategis Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan tahun 2024 belum terealisasi. Pelaksanaan pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah adanya pemeriksaan dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.23
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
2	3	4	5	6
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	Belum ada Opini	Belum ada Opini



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2021-2024.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi sejarah bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun opini WTP pertama kali diterima sejak 18 tahun menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut opini BPK-RI sejak tahun 2015-2024 yaitu:

Tabel 3.24
Opini Laporan Keuangan

No.	TAHUN	NO. SURAT	OPINI BPK	KET
1	2015	54. /LHP/XVIII.MDN/07/2016	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
2	2016	58. /LHP/XVIII.MDN/06/2017	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
3	2017	45. /LHP/XVIII.MDN/05/2018	TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT	
4	2018	57. /LHP/XVIII.MDN/05/2019	TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT	
5	2019	59. /LHP/XVIII.MDN/06/2020	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
6	2020	47. /LHP/XVIII.MDN/06/2021	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
7	2021	57. /LHP/XVIII.MDN/05/2022	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
8	2022	67. /LHP/XVIII.MDN/05/2023	WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN	
9	2023	55. /LHP/XVIII.MDN/05/2024	WAJAR TANPA PENGECEUALIAN	
10	2024		BELUM ADA OPINI	

Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)



Tabel 3.25

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator
kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2021-2024.**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	Belum ada Opini	Belum ada Opini

**3. Perbandingan Realisasi Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun
2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.**

Perbandingan realisasi Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Simalungun belum dapat diukur karena realisasi kinerja tahun 2024 belum terlaksana, namun dari perbandingan realisasi kinerja opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dilihat dari tahun sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian atau Tidak Memberikan Pendapat maka tingkat kemajuan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan telah semakin meningkat dengan harapan di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah dicapai.



Tabel 3.26

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2021-2024.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Belum ada Opini	WTP	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Standar Provinsi dan Nasional terhadap Opini Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu acuan atau pokok-pokok kebijakan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat dalam memberikan Dana Insentif Daerah (DID) adalah daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Belum ada Opini	WAJAR TANPA PENGECUALIAN	

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Upaya untuk mempertahankan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dilakukan dengan menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja indikator kinerja opini laporan keuangan serta mencari alternatif solusi yang telah dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja.

Tabel 3.28

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	Belum ada Opini	Belum ada Opini		Mempertahankan Keberhasilan opini WTP

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan indikator kinerja dan cara untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja.



Tabel 3.29

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realisasi anggaran (RARO)	capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)- RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	1.456.969.700,00	1.252.952.024,00	86,00%	1.456.969.700,00	204.017.676,00	14,00%

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan.

Tabel 3.30

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Belum ada Opini	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan semakin ditingkatkan



Gambar 3.6 LKPD Kab Simalungun Tahun Anggaran 2023

Selanjutnya untuk tahun 2024 opini belum diterima Pemerintah Kabupaten Simalungun, hal ini disebabkan opini laporan keuangan diberikan setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

3.1.2.4 Sasaran Strategis Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sasaran 4

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator 1

Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD



1. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah indikator kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD dengan target 100% dan realisasi 9.83% dan capaian sebesar 9.83% hal ini disebabkan target tidak sesuai pada rencana strategi BPKPD Kab.Simalungun.

Deviasi adalah penyimpangan, sehingga semakin kecil deviasi (penyimpangan) realisasi belanja daerah terhadap total dalam APBD maka semakin baik APBD itu sendiri, seharusnya angka deviasi mendekati 0 (nol) bukan 100%.

Tabel 3.31

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100,00%	9,83%	9,83%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.



Tabel 3.28

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	5,02%	7,20%	8,50%	100,00%	9,83%	9,83%

3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Tabel 3.32

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	9,83%	100,00%	9,83%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.



Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	9,83%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	

- 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Tabel 3.34

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang Dilakukan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100,00%	9,83%	9,83%		Target yang ditetapkan tidak sesuai dengan maksud indikator kinerja yaitu seberapa besar penyimpangan realisasi belanja terhadap total dalam APBD. Sehingga sebaiknya semakin kecil deviasi maka semakin baik.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja

Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD

Tabel 3.35

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realiasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	100,00%	9,83%	9,83%	2.139.746.300,00	1.234.189.143,00	57,68%	210.337.061,29	- 1.023.852.081,71	-47,85%

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.

Tabel 3.36

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	9.83%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.



3.1.2.5 Sasaran Strategis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran 5
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator 1
Manajemen Aset

Sasaran kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerjanya Manajemen Aset dilaksanakan dengan terselenggaranya penatausahaan Barang Milik Daerah yang didukung dengan aplikasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator kinerja manajemen aset dilihat dari terselenggaranya beberapa hal berikut:

1. Apakah Kabupaten Simalungun telah memiliki daftar asset tetap?
2. Apakah Kabupaten Simalungun memiliki petunjuk dan buku manual untuk menyusun daftar asset tetap?
3. Apakah Kabupaten Simalungun melaksanakan proses inventarisasi asset tahunan?
4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan?

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Manajemen Aset.

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja manajemen aset. Pengelolaan Barang Milik Daerah

menggunakan 2 (dua) aplikasi SIMBADA yaitu Sistem Manajemen Barang Milik Daerah dan SIPP AKSI yaitu Sistem Pengendalian Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi.

SIMBADA digunakan untuk menghimpun seluruh aset Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai neraca Kabupaten Simalungun. Sementara SIPP AKSI digunakan untuk mencatatkan aset tahun berjalan yang selanjutnya diintegrasikan kepada SIMBADA setelah verifikasi penatausahaan aset berjalan. Sehingga, manajemen Barang Milik Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.37

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Manajemen Aset

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Manajemen Aset

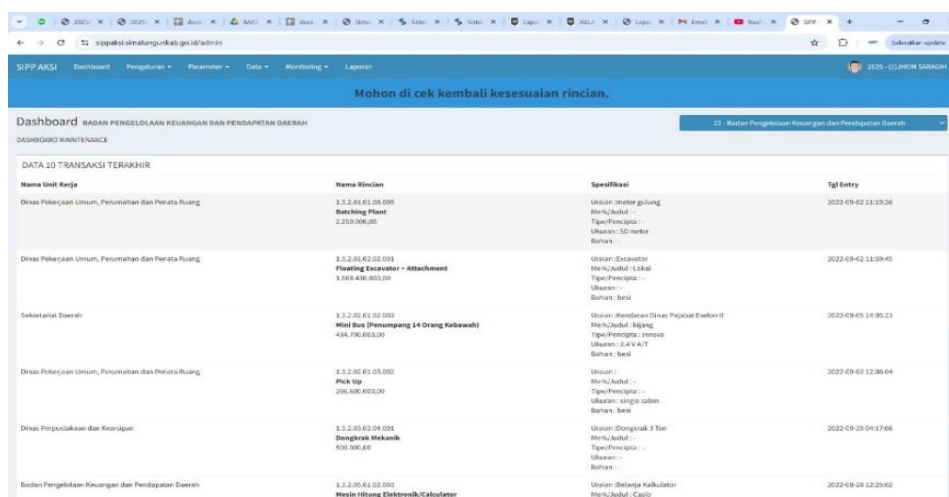
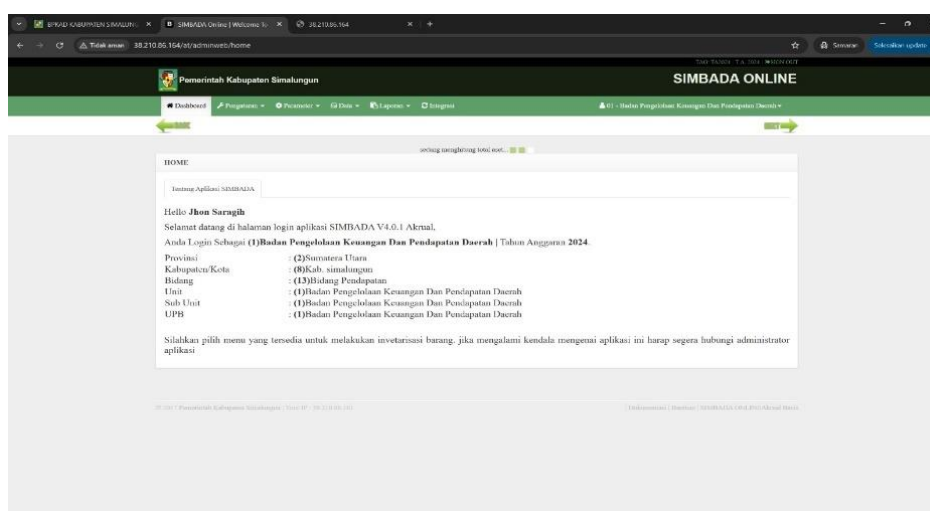
Pelaksanaan Manajemen Aset dengan menggunakan aplikasi dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Pencatatan aset untuk tahun 2021 masih menggunakan excel/manual sehingga realisasi untuk tahun 2021 belum memenuhi target kinerja.

Kabupaten Simalungun telah memiliki daftar aset tetap, sejak tahun 2022 upaya BPKPD dalam menghimpun penatausahaan aset dilaksanakan dengan aplikasi



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

SIMBADA (Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah) dan aplikasi SIPP AKSI (Sistem Pengendalian Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi). Aplikasi SIPP AKSI bertujuan mencatat aset tahun berjalan yang terintegrasi dengan aplikasi penatausahaan keuangan (SIMDA FMIS maupun SIPD) dan selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi SIMBADA sebagai database dan olahan data aset Kabupaten Simalungun secara keseluruhan.



Gambar 3.7 Aplikasi SIMBADA dan Aplikasi SIPP AKSI



Tabel 3.38

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Manajemen Aset

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	-	YA	YA	YA	YA	YA

3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Manajemen Aset Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Kabupaten Simalungun memiliki petunjuk dan buku manual untuk menyusun daftar asset tetap. Dalam menjalankan aplikasi SIMBADA dan SIPP AKSI telah disusun dalam book manual. Selanjutnya pedoman pengelolaan BMD telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR **5** TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 551 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

Gambar 3.8 Screenshoot PERDA NO 5 Tahun 2022

Buku Panduan Aplikasi SIMBADA | 6

1. PENGERTIAN SIMBADA

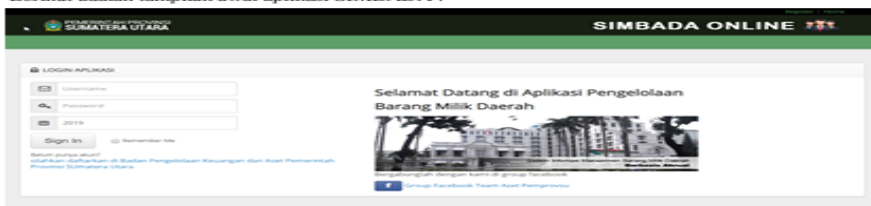
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah Sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen barang milik daerah. Kegiatan yang ada dalam sistem ini meliputi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang, penerimaan barang, inventarisasi barang daerah dalam bentuk aset tetap, set tak berwujud dan aset lain-lain.

Manajemen Aplikasi SIMBADA

- 🔗 Perencanaan Kebutuhan
- 🔗 Pengadaan Barang
- 🔗 Penyimpanan/Penyaluran Barang
- 🔗 Inventarisasi
- 🔗 Penyusutan
- 🔗 Penghapusan

2. PORTAL SIMBADA ONLINE

Untuk masuk ke dalam simbada online, pengguna buka browser kemudian masukkan/ketikkan alamat web. Contoh : "simbada.sumutprov.go.id" Berikut adalah tampilan awal aplikasi SIMBADA :



Gambar 3.9 Manual SIMBADA



Tabel 3.39

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Manajemen Aset Tahun 2024
dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.**

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA

**4 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Manajemen Aset
Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional**

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Manajemen Aset Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional. Namun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan setiap tahun dan wajib dilakukan dalam 5 tahun sekali.

Kabupaten Simalungun telah melaksanakan proses inventarisasi aset tahunan. Selama kurun waktu 3 tahun BPKPD melaksanakan inventarisasi aset secara bertahap pada tiap Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yaitu :

1. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/22650/28.5/2022 tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2022.
2. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/13457/28.5/2023 tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023.3.
3. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/343.k/28.5/2024 tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan

Bangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 188.45/**22650** / 28.5/2022

T E N T A N G

PENETAPAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat, maka perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Gambar 3.10 Surat Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan
Hasil Inventarisasi KIB A



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 100.3.3.2/**13457** / 28.5/2023

T E N T A N G

PENETAPAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat maka perlu dilaksanakan tahapan inventarisasi terhadap objek inventarisasi Barang Milik Daerah yaitu pelaporan hasil inventarisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Gambar 3.11 Surat Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan
Hasil Inventarisasi KIB B



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 100.3.3.2/343.k/ 28.5/2024

T E N T A N G

PENETAPAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 476 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat maka perlu dilaksanakan tahapan inventarisasi terhadap objek inventarisasi Barang Milik Daerah yaitu pelaporan hasil inventarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Gambar 3.12 Surat Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan
Hasil Inventarisasi KIB C

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Manajemen Aset
Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	YA

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan Indikator Kinerja Manajemen Aset serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Kemampuan Perangkat Daerah dalam mengelola aset terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Simalungun. Perangkat daerah tetap dibekali kegiatan pelatihan dan sosialisasi, rekonsiliasi aset juga rutin diselenggarakan. Berikut gambar pelaksanaan sosialisasi dan inventarisasi :



Gambar 3.13 Sosialisasi Inventarisasi KIB A



Gambar 3.14 Pelaksanaan Inventarisasi KIB B di BPKPD



Gambar 3.15 Sosialisasi Inventarisasi KIB C

Tabel 3.41

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan Indikator Kinerja Manajemen Aset serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	YA	Keberhasilan	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Manajemen Aset



Tabel 3.42
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Manajemen Aset

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realisasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)- RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	YA	100,00%	3.596.983.220,00	2.425.199.037,00	67,42%	3.596.983.220,00	1.171.784.183,00	32,58%

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Manajemen Aset.

Dalam melaksanakan indikator kinerja manajemen aset perlu dilaksanakan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atapun kegagalan pencapaian indikator kinerja manajemen aset. Tahun 2024 BPKPD Kabupaten Simalungun telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penatausahaan aset sehingga dapat melaksanakan capaian kinerja 100% pada setiap tahapannya.

Tabel 3.43
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun
Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Manajemen Aset.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	YA	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Manajemen Aset telah didukung aplikasi SIMBADA untuk aplikasi seluruh penatausahaan aset dan SIPP AKSI dalam pelaksanaan pentausahaan aset tahun berjalan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

Capaian 100% pada kinerja manajemen aset juga dapat dilihat dari upaya dalam menyajikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang telah mencantumkan nilai aset dalam laporan keuangan setiap tahunnya, berikut screen shoot neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022-2024.

Gambar 3.16
Screenshoot Neraca LKPD

Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2022

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas & Kas Daerah	193.055.179.643,51	123.851.375.538,52
Kas & Bendahara Permanen	0,00	0,00
Kas & Bendahara Pengeluaran	0,00	1.265.303,00
Kas & BLUD	6.001.742.077,80	16.458.434.106,80
Kas Dana BOS	704.969.570,53	2.310.783.240,13
Kas Dana Koperasi pada FKTP	6.838.291.842,00	15.585.088.348,24
Kas Lainnya	0,00	5.842.209,00
Setera Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Pinjaman Pajak Daerah	103.807.509.236,40	97.704.407.382,40
Pinjaman Hibah Pengalihan Kekayaan Daerah yang Dipertahankan	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00
Pinjaman Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Pinjaman Lain-lain PAD yang Sah	1.202.314.800,00	1.927.082.900,00
Pinjaman Transfer Pemerintah Pusat	0,00	759.826.480,00
Pinjaman Transfer Antar Daerah	0,00	44.514.386.288,00
Pinjaman Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Pinjaman	(74.800.303.507,04)	(67.346.443.157,28)
Beban Utanglaya Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	13.018.540.801,69	13.252.273.402,58
JUMLAH ASET LANCAR	252.148.626.065,89	251.334.091.682,39
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00

5

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN			
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Tahun Anggaran 2022			
URAIAN	2022	2021	
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	115.306.527.034,90		109.323.726.046,37
Investasi Perantara Program Daerah	0,00		0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	115.306.527.034,90		109.323.726.046,37
ASSET TETAP			
Tanah	626.714.390.190,22		680.292.559.382,08
Perawatan dan Mesin	186.578.471.373,25		503.587.739.073,12
Gedung dan Bangunan	1.469.600.113.326,06		1.441.097.352.142,48
Jalan, jembatan, dan Irigasi	2.242.516.207.228,22		2.133.734.790.284,50
Aset Tetap Lainnya	256.077.283.790,52		258.453.832.243,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.327.647.170,57		17.341.271.333,44
Akumulasi Penghapusan	(2.453.145.606.817,06)		(1.814.242.570.295,27)
JUMLAH ASSET TETAP	2.752.718.506.228,19		3.117.294.874.259,44
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00		0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00		0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37		606.447.010,37
Kemudahan dengan Pihak Ketiga	0,00		0,00
Aset Tidak Berwujud	1.412.145.900,00		544.171.000,00
Aset Lain-lain	187.153.201.511,15		154.229.022.504,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(638.829.188,00)		(145.500.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(186.939.201.511,75)		(183.815.022.504,00)
Pinjaman Corporate Farming	1.300.746.200,00		1.300.746.200,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Corporate Farming	(1.300.746.200,00)		(1.300.746.200,00)
Akumulasi Penyusutan Tagihan Jangka Panjang	(606.447.010,37)		(606.447.010,37)
Utang PTK Bendahara	651.652.368,00		651.652.368,00
Akumulasi Penyusutan Utang PTK Bendahara	(651.652.368,00)		(651.652.368,00)
Dana Bergulir	296.800.000,00		296.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Dana Bergulir	(296.800.000,00)		(296.800.000,00)
Aset Yang Dioperasikan (Berkas)	9.047.615.000,00		9.047.615.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Yang Dioperasikan (Berkas)	(9.047.615.000,00)		(9.047.615.000,00)
Aset Yang Dioperasikan (Tanah)	56.749.884.220,00		56.749.884.220,00
Pinjaman Pajak Daerah, Restitusi Daerah Maori	532.992.916,00		532.992.916,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Pajak Daerah, Restitusi Daerah Maori	(532.992.916,00)		(532.992.916,00)
Pinjaman Yang Tidak Disetujui	890.390.066,00		890.390.066,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Yang Tidak Disetujui	(890.390.066,00)		(890.390.066,00)

Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas & Kas Daerah	121.361.000.622,76	193.055.179.643,51
Kas & Bendahara Permanen	0,00	0,00
Kas & Bendahara Pengeluaran	0,00	1.265.303,00
Kas & BLUD	2.178.784.057,80	6.001.742.077,80
Kas Dana BOS	474.612.417,58	604.942.870,53
Kas Dana Koperasi pada FKTP	6.943.003.348,18	6.838.291.842,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setera Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Pinjaman Pajak Daerah	114.625.108.052,43	103.807.509.236,40
Pinjaman Hibah Pengalihan Kekayaan Daerah yang Dipertahankan	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00
Pinjaman Lain-lain PAD yang Sah	3.044.566.622,00	1.202.314.900,00
Pinjaman Transfer Pemerintah Pusat	86.115.542.586,00	0,00
Pinjaman Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Lainnya	(86.740.742.481,00)	(74.800.303.507,04)
Persediaan	13.058.816.391,18	13.018.540.801,69
JUMLAH ASET LANCAR	263.658.580.441,90	252.148.626.065,89
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	118.601.860.560,45	115.306.527.034,90
Pembelian Modal	0,00	0,00
Investasi Permanen Program Daerah	0,00	0,00

4

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2023
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	118.601.860.560,45	115.306.527.034,90
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	118.601.860.560,45	115.306.527.034,90
ASSET TETAP	622.687.637.150,75	626.714.390.190,22
Tanah	622.687.637.150,75	626.714.390.190,22
Perawatan dan Mesin	651.454.752.219,87	186.578.471.373,25
Gedung dan Bangunan	1.588.142.793.354,34	1.469.600.113.326,06
Jalan, Jembatan, dan Irigasi	2.242.612.046.358,27	2.242.516.207.228,22
Aset Tetap Lainnya	232.315.527.348,11	256.077.283.790,52
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.327.647.170,57	15.327.647.170,57
Akumulasi Penghapusan	(2.461.154.810.710,46)	(2.453.145.606.817,06)
JUMLAH ASSET TETAP	2.957.622.374.737,81	2.752.718.506.228,19
DANA CADANGAN	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	606.447.010,37	606.447.010,37
Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37	606.447.010,37
Kemudahan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.265.502.666,00	1.412.145.900,00
Aset Lain-lain	187.153.201.511,15	187.153.201.511,15
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(642.411.480,00)	(638.829.188,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(186.939.201.511,75)	(186.939.201.511,75)
Dana Transfer Treasury Disposal Facility (TDF)	13.537.386.000,00	0,00
Pinjaman Corporate Farming	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Corporate Farming	(1.300.746.200,00)	(1.300.746.200,00)
Akumulasi Penyusutan Tagihan Jangka Panjang	(606.447.010,37)	(606.447.010,37)
Utang PTK Bendahara	651.652.368,00	651.652.368,00
Akumulasi Penyusutan Utang PTK Bendahara	(651.652.368,00)	(651.652.368,00)
Dana Bergulir	296.800.000,00	296.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Dana Bergulir	(296.800.000,00)	(296.800.000,00)
Aset Yang Dioperasikan (Berkas)	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Yang Dioperasikan (Berkas)	(9.047.615.000,00)	(9.047.615.000,00)
Aset Yang Dioperasikan (Tanah)	56.749.884.220,00	56.749.884.220,00
Pinjaman Pajak Daerah, Restitusi Daerah Maori	532.992.916,00	532.992.916,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Pajak Daerah, Restitusi Daerah Maori	(532.992.916,00)	(532.992.916,00)
Pinjaman Yang Tidak Disetujui	890.390.066,00	890.390.066,00
Akumulasi Penyusutan Pinjaman Yang Tidak Disetujui	(890.390.066,00)	(890.390.066,00)
Tagihan Pinjaman Pemerintah Kabupaten	(15.416.520,00)	(15.416.520,00)
Akumulasi Penyusutan Tagihan Pinjaman Pemerintah Kabupaten	(15.416.520,00)	(15.416.520,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	3.044.566.622,00	3.044.566.622,00
JUMLAH ASET	3.044.566.622,00	3.044.566.622,00

5



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024			
URAIAN	2024	2023	
Susunan Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
Pembiayaan Modal	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Susunan Pembiayaan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Jumlah Asil Investasi Jangka Panjang Permanen	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Jumlah Asil Tetap	0,00	0,00	
Tanah	621.267.758.091,73	622.557.837.550,73	
Perakitan dan Mesin	773.982.581.051,43	660.444.758.219,67	
Salang dan Bangunan	1.849.785.303.303,25	1.849.785.303.303,25	
Jalan, Jembatan, dan Bangunan	2.404.821.045.366,87	2.404.821.045.366,87	
Asal Tetap Lainnya	233.709.045.745,17	232.216.592.345,17	
Susunan Dana Pembiayaan	3.576.316.845,00	21.892.316.019,73	
Akumulasi Pembiayaan	(3.006.491.427.050,89)	(2.981.099.879.295,89)	
Jumlah Asil Tetap	3.844.424.691.495,79	2.553.622.376.737,51	
Dana Cadangan	0,00	0,00	
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	
ASSET LAINNYA	0,00	0,00	
Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37	606.447.010,37	
Bendahara dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Asal Tetap Berwujud	2.553.622.843,00	2.553.622.843,00	
Asal Lain-lain	187.586.923.823,99	187.586.923.823,99	
Akumulasi Amortisasi Asil Tidak Berwujud	(1.117.111.500,00)	(942.431.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Asil Lain-lain	(187.586.923.823,99)	(187.586.923.823,99)	
Piutang Corporate Financing	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00	
Akumulasi Penyusutan Piutang Corporate Financing	(1.300.746.200,00)	(1.300.746.200,00)	
Akumulasi Penyusutan Tagihan Jangka Panjang	(606.447.010,37)	(606.447.010,37)	
Utang PPK Bendahara	551.652.368,00	551.652.368,00	
Akumulasi Penyusutan Utang PPK Bendahara	(551.652.368,00)	(551.652.368,00)	
Dana Bergilir	298.800.000,00	298.800.000,00	
Akumulasi Penyusutan Dana Bergilir	(298.800.000,00)	(298.800.000,00)	
Asal Yang Diakumulasi (Gedung)	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00	
Akumulasi Penyusutan Asil Yang Diakumulasi (Gedung)	(9.047.615.000,00)	(9.047.615.000,00)	
Asal Yang Diakumulasi (Tanah)	56.745.884.220,00	56.745.884.220,00	
Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Masi	532.992.916,00	532.992.916,00	
Akumulasi Penyusutan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Masi	(532.992.916,00)	(532.992.916,00)	

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024			
URAIAN	2024	2023	
Susunan Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
Pembiayaan Modal	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Susunan Pembiayaan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Jumlah Asil Investasi Jangka Panjang Permanen	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	125.619.999.924,81	118.091.899.599,48	
Jumlah Asil Tetap	0,00	0,00	
Tanah	621.267.758.091,73	622.557.837.550,73	
Perakitan dan Mesin	773.982.581.051,43	660.444.758.219,67	
Salang dan Bangunan	1.849.785.303.303,25	1.849.785.303.303,25	
Jalan, Jembatan, dan Bangunan	2.404.821.045.366,87	2.404.821.045.366,87	
Asal Tetap Lainnya	233.709.045.745,17	232.216.592.345,17	
Susunan Dana Pembiayaan	3.576.316.845,00	21.892.316.019,73	
Akumulasi Pembiayaan	(3.006.491.427.050,89)	(2.981.099.879.295,89)	
Jumlah Asil Tetap	3.844.424.691.495,79	2.553.622.376.737,51	
Dana Cadangan	0,00	0,00	
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	
ASSET LAINNYA	0,00	0,00	
Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37	606.447.010,37	
Bendahara dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Asal Tetap Berwujud	2.553.622.843,00	2.553.622.843,00	
Asal Lain-lain	187.586.923.823,99	187.586.923.823,99	
Akumulasi Amortisasi Asil Tidak Berwujud	(1.117.111.500,00)	(942.431.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Asil Lain-lain	(187.586.923.823,99)	(187.586.923.823,99)	
Piutang Corporate Financing	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00	
Akumulasi Penyusutan Piutang Corporate Financing	(1.300.746.200,00)	(1.300.746.200,00)	
Akumulasi Penyusutan Tagihan Jangka Panjang	(606.447.010,37)	(606.447.010,37)	
Utang PPK Bendahara	551.652.368,00	551.652.368,00	
Akumulasi Penyusutan Utang PPK Bendahara	(551.652.368,00)	(551.652.368,00)	
Dana Bergilir	298.800.000,00	298.800.000,00	
Akumulasi Penyusutan Dana Bergilir	(298.800.000,00)	(298.800.000,00)	
Asal Yang Diakumulasi (Gedung)	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00	
Akumulasi Penyusutan Asil Yang Diakumulasi (Gedung)	(9.047.615.000,00)	(9.047.615.000,00)	
Asal Yang Diakumulasi (Tanah)	56.745.884.220,00	56.745.884.220,00	
Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Masi	532.992.916,00	532.992.916,00	
Akumulasi Penyusutan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Masi	(532.992.916,00)	(532.992.916,00)	

3.1.2.6 Sasaran Strategis Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Daerah

Sasaran 6

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator 1

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Indikator kinerja Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk



pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah dengan target 100% telah dilaksanakan dan realisasi 100% sehingga capaian menjadi 100%.

Tabel 3.44
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Informasi
Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik
Terhadap Informasi Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%

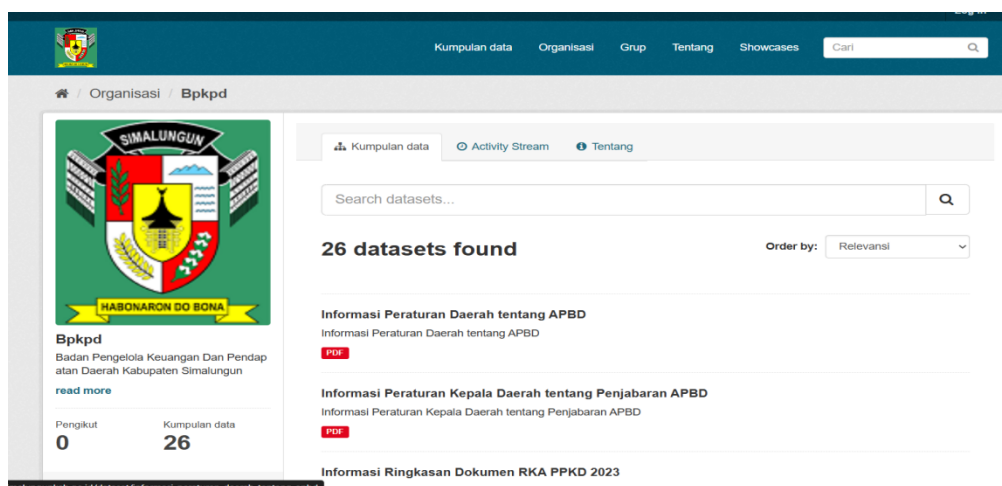
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah.

Pelayanan akses publik dilaksanakan dengan berbagai cara baik digital maupun manual. Pelayanan akses publik secara digital telah dilaksanakan secara aplikasi. Pelayanan publik secara digital dapat dilihat pada :

1. Penganggaran dan pelaporan dapat diakses pada : Simalungkab.go.id dengan portal <https://portalsatudata.simalungkab.go.id/dataset/6e0ce03b-9446-494d-8546-3f9ab221777e/resource/77c24ca1-d803-4326-b952-a9d7ca6f2076/download/tahun-2024.pdf>

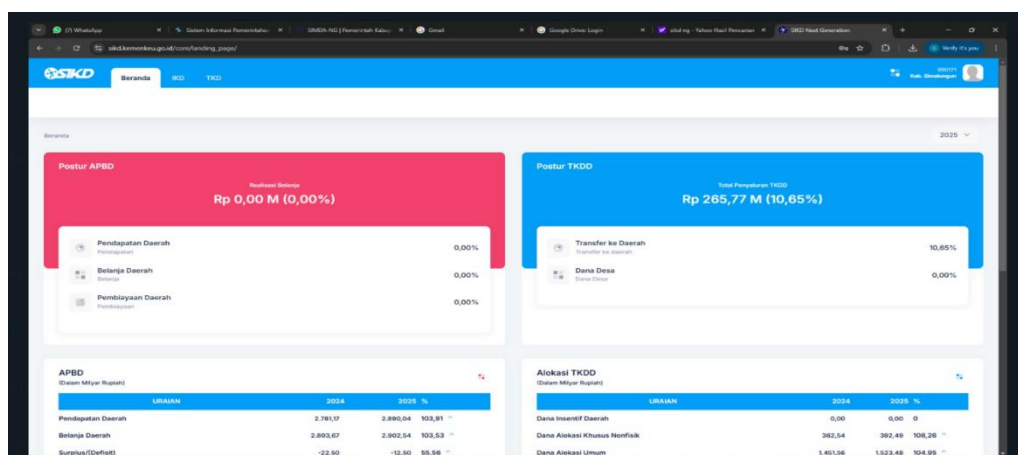


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



Gambar 3.17 Dashboard website Simalungun

2. SIKD : Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan aplikasi dari Kementerian Keuangan dan menjadi aplikasi laporan bagi Pemerintah Daerah.

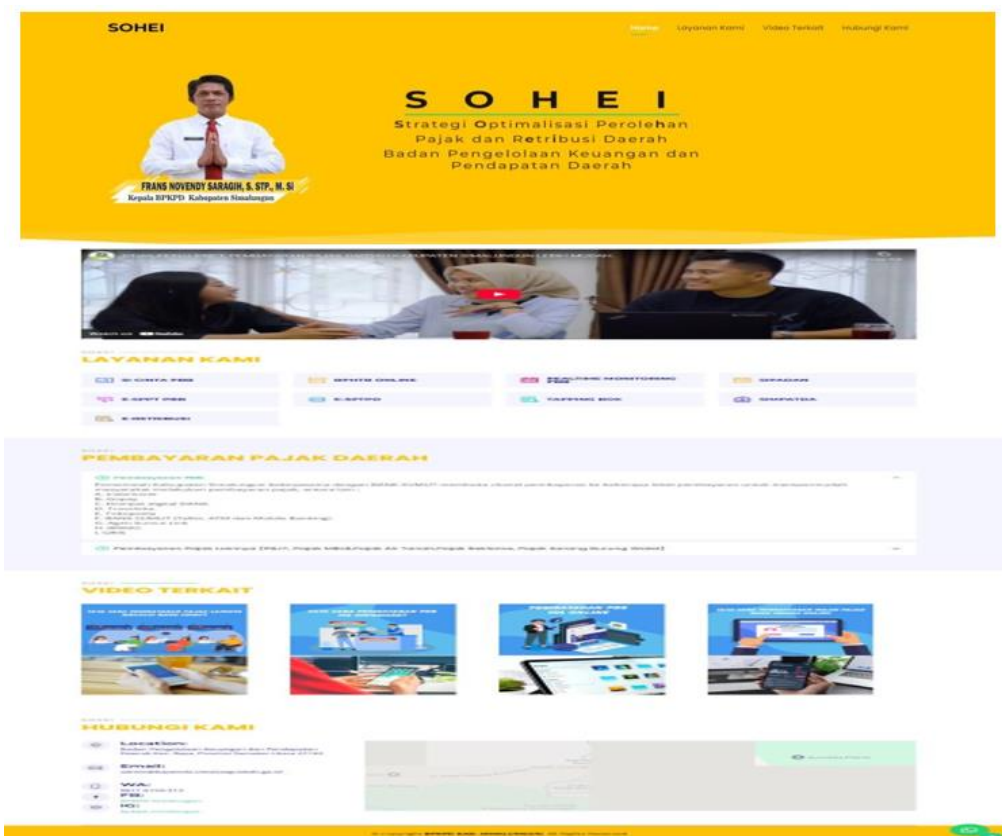


Gambar 3.18 Dashboard SIKD Simalungun

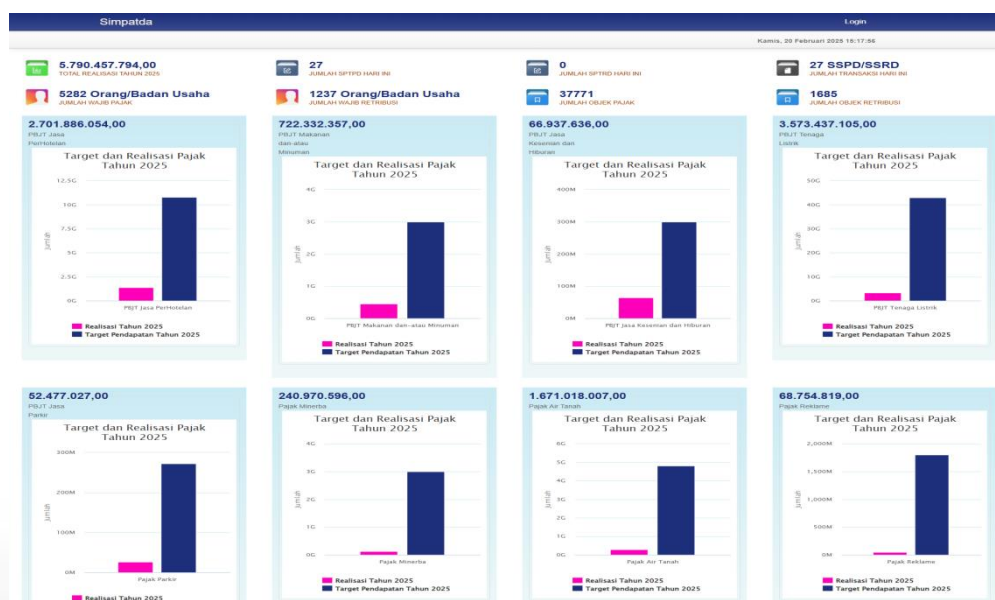
3. Pajak Daerah dapat diakses pada <https://bpkpd.simalungunkab.go.id/> dan SIMPATDA : <http://simpatda.simalungunkab.go.id/>



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



Gambar 3.19 Dashboard SOHEI



Gambar 3.20 Dashboard SIMPATDA



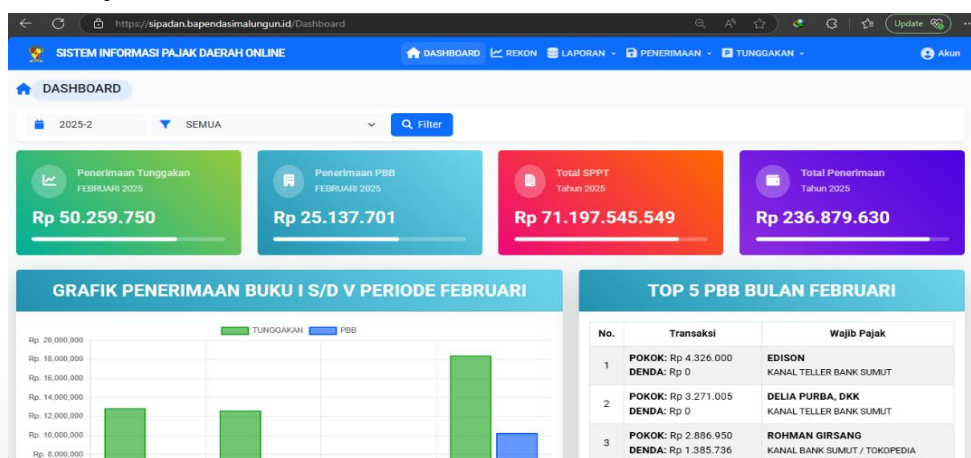
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

4. E-SPTPD : <https://esptpd.simalungunkab.go.id/> Pelaporan Pajak Daerah Secara Online dan Integrasi dengan Aplikasi BSRE dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada penerbitan SKPD secara Elektronik.

Gambar 3.21 Dashboard E-STPD

5. SIPADAN : sipadan.bapendasilungun.id

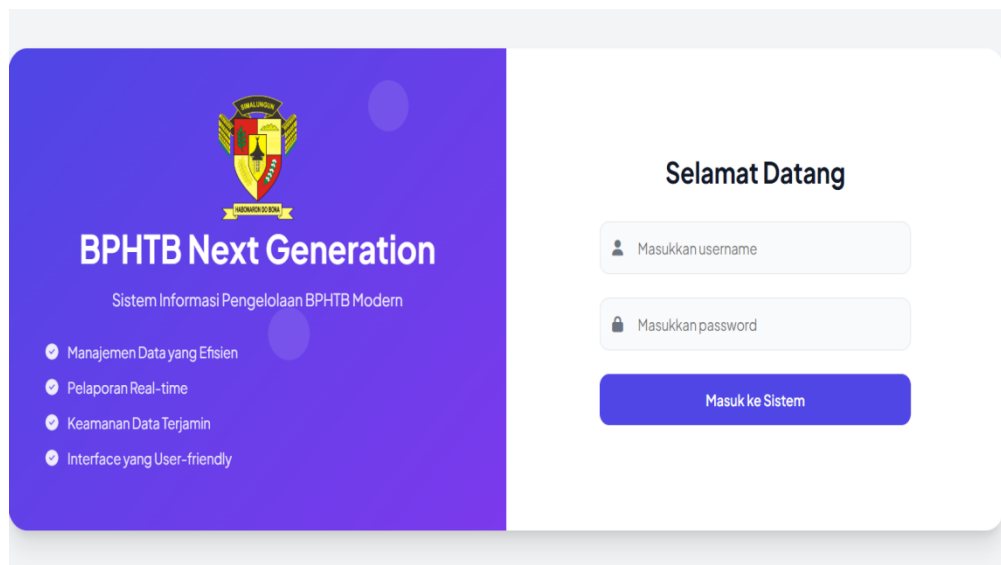
Menyajikan data Penerimaan Piutang, Penerimaan PBB, Total SPPT, Total Penerimaan, Grafik Penerimaan mulai dari Buku I s/d Buku V, dan juga menyajikan tampilan data Transaksi pembayaran PBB terbesar setiap bulannya.



Gambar 3.22 Dashboard SIPADAN



6. BPHTB Kab Simalungun : <https://bphtb.bapendasimalungun.id/>.



Gambar 3.23 Dashboard BPHTB Kab.Simalungun

7. Pajak Bumi dan Bangunan dapat diakses pada:

<https://pad.bapendasimalungun.id/>

No.	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
A.	PBB	71,320,562,744	94,245,246	0	71,226,317,498
1.	DOLOK BATU NANGGAR	437,633,745	760,282	0	436,873,463
2.	DOLOK PANRIBUAN	450,682,507	574,872	0	450,107,635
3.	BANDAR MASILAM	5,285,877,397	884,341	0	5,284,993,056
4.	DOLOK SILAU	485,148,874	531,396	0	484,617,478
5.	GUNUNG MALIGAS	518,641,846	2,995,982	1	515,645,864
6.	RAYA	941,859,788	4,486,740	0	937,373,048
7.	JAWA MARAJA BAH JAMBI	331,838,559	820,011	0	331,018,548
8.	PAMATANG SIDAMANIK	235,555,179	10,000	0	235,545,179
9.	SILIMAKUTA	426,815,708	3,364,177	1	423,451,531
10.	TAPIAN DOLOK	10,799,370,740	15,278,476	0	10,784,092,264
11.	DOLOK PARDAMEAN	267,394,489	210,691	0	267,183,798
12.	PANOMBEIAN PANEI	472,660,720	901,850	0	471,758,870
13.	TANAH JAWA	1,039,725,132	6,702,620	1	1,033,022,512

Gambar 3.24 Dashboard PBB-P2 Kab.Simalungun

8. Retribusi Daerah. Pengelolaan Retribusi Daerah secara online yang digunakan oleh OPD pengelola retribusi dan Host to host pembayaran dengan bank sumut.



Gambar 3.25 Dashboard E-RETRIBUSI

9. Pengaduan Pelayanan Publik dapat diakses melalui whatsapp BPKPD



Gambar 3.26 Layanan Pengaduan



Tabel 3.45
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja
Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses
Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	75%	80%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap	100%	100%	100%



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Tabel 3.47

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Tabel 3.48

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	Keberhasilan	Peningkatan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja



**Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia
Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan
Daerah.**

Tabel 3.49
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia
Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan
Daerah.

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realiasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)- RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	527.266.539.900,00	525.052.982.246,20	99,58%	527.266.539.900,00	2.213.557.653,80	0,42%

**7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun
Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Informasi
Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik
Terhadap Informasi Keuangan Daerah**

Dengan menganalisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah diharapkan inovasi-inovasi tidak berhenti setelah mendapat keberhasilan. Namun perlu memahami hal-hal yang diperlukan untuk semakin mengetahui hal-hal yang masih dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan publik.



Pelayanan akses publik secara manual hadir untuk menjawab masyarakat/wajib pajak yang hendak bertemu langsung dengan pegawai yang dibutuhkan. BPKPD telah membuka ruang pelayanan publik terpusat dan terintegrasi untuk menjawab pelayanan publik secara manual yang dinamakan Balei Pelayanan BPKPD. Balei Pelayanan BPKPD resmi dilaunching oleh Bupati Simalungun tanggal 17 Januari 2024. Berikut analisis capaian program :

Tabel 3.50

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan akses publik terhadap informasi keuangan daerah didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime dan juga manual disebut Balei Pelayanan BPKPD

Balei Pelayanan menyediakan hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan sebanyak 17 (tujuh belas) layanan operasional BPKPD sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/345/28.5/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun .

2. Ruang Pelayanan Umum dan Ruang Pelayanan Khusus bagi masyarakat yang membutuhkan terkait Standar Pelayanan BPKPD.
3. Ruang Pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan terkait Standar Pelayanan BPKPD.
4. Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat/ wajib pajak apabila pelayanan BPKPD tidak dilaksanakan sesuai standar pelayanan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 188.45/ 345 /28.5 /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkupan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Gambar 3.27 Surat Keputusan Kepala BPKPD Penetapan Standar Pelayanan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH



STANDARD PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Produk Pelayanan	Persyaratan	Mekanisme / prosedur	Biaya	Waktu	Keterangan
1	PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)	1. Foto Copy KTP Pemilik atau yang dikuasakan (dilengkapi dengan surat kuasa) 2. Foto Copy NPWP 3. Dokumen Perizinan / Surat Pernyataan akan mengurus izin (bermaterai) 4. Mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)	1. Wajib Pajak datang membawa berkas persyaratan ke pelayanan 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas, jika data persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 3. Jika berkas sudah sesuai, petugas pajak mengentri data wajib pajak 4. Selanjutnya akan di informasikan petugas pelayanan jika data sudah selesai	Rp. 0,-	± 60 Menit	
2	PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)	1. Sudah Memiliki NPWPD 2. Mengisi form - SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 3. Melampirkan Dokumen Omset Peredaran Usaha sesuai masa pajak yang dilaporkan	1. Wajib Pajak datang membawa berkas persyaratan ke pelayanan 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas, jika data persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 3. Jika berkas sudah sesuai, petugas pajak mengentri data wajib pajak 4. Selanjutnya akan di informasikan petugas pelayanan jika data sudah selesai	Rp. 0,-	± 60 Menit	
3	PENERBITAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	1. Melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Daerah 2. Melampirkan SKPD	1. Wajib Pajak datang membawa berkas persyaratan ke pelayanan 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas, jika data persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 3. Jika berkas sudah sesuai, petugas pajak mengentri data wajib pajak 4. Selanjutnya akan di informasikan petugas pelayanan jika data sudah selesai	Rp. 0,-	± 60 Menit	VA dihari yang sama Transfer REKUD H+1 Kliring H+2
4	PENUTUPAN NPWPD	1. Surat Keterangan Dari Pangulu / Lurah 2. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak (Bermaterai)	1. Wajib Pajak datang membawa berkas persyaratan ke pelayanan 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas, jika data persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 3. Jika berkas sudah sesuai, petugas pajak mengubah status data wajib pajak 4. Selanjutnya akan di informasikan petugas pelayanan jika data sudah selesai	Rp. 0,-		Perinjauan lapangan
5	PENERBITAN OBJEK PAJAK	1. Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak 2. Pengisian SPOP/SPOP 3. Foto Copy Bukti Surat Tanah 4. Surat KuasaWajib Pajak 5. Foto Copy KTP Pemberikuasa/Penerima Kuasa 6. Surat Keterangan/ belum mempunyai SPPT PBB dari Lurah/Kepala Desa 7. NOP Tentang Objek Pajak 8. Foto Tanah/Bangunan 9. Surat Pernyataan NOP Tentang Tidak Meminta Perubahan/Dimudian hari	1. Wajib Pajak mendatangi kantor pelayanan BPKPD 2. Wajib pajak melakukan Pendaftaran PBB & BPHTB 3. Mendaftarkan Penerbitan, pembetulan, pemecahan PBB 4. Wajib Pajak mengisi formulir serta melengkapi dokumen yang diperlukan 5. Wajib Pajak menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi ke pelayanan 6. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas 7. Proses penginputan data 8. Pelayanan menyerahkan berkas yang telah selesai di proses dan bayar ketempat pembayaran yang telah ditentukan	Rp. 0,-	± 60 Menit	
6	PEMBETULAN/MUTASI OBJEK PAJAK	1. Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak 2. Pengisian SPOP/SPOP 3. Foto Copy/ Bukti Surat Tanah 4. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa apabila Surat Tanah tidak lengkap 5. Surat KuasaWajib Pajak 6. Foto CopyKTP Pemberi Kuasa/Penerima Kuasa 7. SPPT PBB Asli Tahun Berjalan 8. Lunas Tunggal 9. Foto Tanah/Bangunan 10. Jika kemungkinan tidak sesuai dengan Data, maka akan dilaksanakan tinjauan lapangan.	1. Wajib Pajak mendatangi kantor pelayanan BPKPD 2. Wajib pajak melakukan Pendaftaran PBB & BPHTB 3. Mendaftarkan Penerbitan, pembetulan, pemecahan PBB 4. Wajib Pajak mengisi formulir serta melengkapi dokumen yang diperlukan 5. Wajib Pajak menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi ke pelayanan 6. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas 7. Proses penginputan data 8. Pelayanan menyerahkan berkas yang telah selesai di proses dan bayar ketempat pembayaran yang telah ditentukan	Rp. 0,-	± 90 Menit	

Gambar 3.28 Standar Pelayanan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  P2DD PERENCANAAN & PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH STANDARD PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN						
No	Produk Pelayanan	Persyaratan	Mekanisme / prosedur	Biaya	Waktu	Keterangan
7	PEMECAHAN OBJEK PAJAK	1. Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak 2. Pengisian SPOP/SPOP 3. Foto Copy Surat Tanah Induk 4. Foto Copy Surat Tanah yang Dipecah 5. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa apabila Surat Tanah tidak lengkap 6. Surat Kuasa Wajib Pajak 7. Foto Copy KTP 8. Pemberi Kuasa/Penerima Kuasa 9. SPPT PBB Asli Tahun Berjalan 10. Foto Tanah/Bangunan 11. Jika kemungkinan tidak sesuai dengan Data, maka akan dilaksanakan tinjau lapangan.	1. Wajib Pajak mendatangi kantor pelayanan BPKPD 2. Wajib pajak melakukan Pendaftaran PBB & BPHTB 3. Mendaftarkan Penerbitan, pembetulan, pemecahan PBB 4. Wajib Pajak mengisi formulir serta melengkapi dokumen yang diperlukan 5. Wajib Pajak menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi ke pelayanan 6. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas 7. Proses penginputan data 8. Pelayanan menyerahkan berkas yang telah selesai di proses dan bayar ketempat pembayaran yang telah ditentukan	Rp. 0,-	± 90 Menit	
8	VALIDASI BPHTB	1. Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak 2. Pengisian SPOP/BPHTB 3. Foto Copy Bukti Surat Tanah 4. Surat Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan 5. Foto Copy KTP Pemberi Kuasa/Penerima Kuasa 6. Foto Tanah/Bangunan 7. Foto Copy SPPT PBB (Namaharus sesuai dengan permohonan yang terlampir) 8. Lunas Tunggakan PBB 9. Jika kemungkinan tidak sesuai dengan Data, maka akan dilaksanakan tinjau lapangan.	1. Wajib Pajak mendatangi kantor pelayanan BPKPD 2. Wajib pajak melakukan Pendaftaran PBB & BPHTB 3. Wajib Pajak mengisi formulir serta melengkapi dokumen yang diperlukan 4. Wajib Pajak menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi ke pelayanan 5. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas 6. Proses penginputan data 7. Berkas akan divalidasi terlebih dahulu 8. Pelayanan menyerahkan berkas yang telah selesai di proses dan bayar ketempat pembayaran yang telah ditentukan	Rp. 0,-	± 90 Menit	Biaya: Pengurusan Gratis kecuali Pembayaran Pajak BPHTB
9	PENERBITAN SP2D - GU	1. SPP 2. SPM 3. Surat Pernyataan tanggungjawab pengguna Anggaran 4. Surat pengajuan SPP / SPM / LS / TU 5. Verifikasi PP Keuangan 6. Bukti Transfer 7. Bukti setor pajak	1. OPD menyampaikan berkas pengusulan spp, spm 2. Menerima kelengkapan berkas pengusulan spp, spm 3. Memeriksa dan meneliti berkas pengusulan spp spm dari opd 4. Menerbitkan SP2D	Rp. 0,-	Max 1 X 24 jam	
10	PENERBITAN SP2D - LS	1. SPP 2. SPM 3. Verifikasi PP Keuangan 4. Surat Pernyataan tanggungjawab pengguna Anggaran 5. Surat pengajuan SPP / SPM / LS / TU 6. Berita acara serah terima 7. Berita acara kemajuan pekerjaan 8. Berita acara pembayaran 9. Jaminan uang muka 10. Jaminan Pemeliharaan 11. Bukti penerimaan 12. E-billing 13. Foto / Dokumentasi kegiatan	1. OPD menyampaikan berkas pengusulan spp, spm 2. Menerima kelengkapan berkas pengusulan spp, spm 3. Memeriksa dan meneliti berkas pengusulan spp spm dari opd 4. Menerbitkan SP2D	Rp. 0,-	Max 1 X 24 jam	
11	PENERBITAN SKPP	1. SK Pensiun 2. SK Pindah/Mutasi Keluar daerah	1. Menyampaikan informasi tentang syarat Penerbitan SKPP kepada OPD 2. Menghimpun SK yang telah masuk ke subbid gaji dari OPD 3. Mengolah data SK yang telah masuk dari OPD untuk penerbitan SKPP	Rp. 0,-	Max 1 X 24 jam	

Gambar 3.29 Lanjutan Standar Pelayanan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  PDD PERENCANAAN & PELUASAN DIGITALISASI DAERAH STANDARD PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN						
No	Produk Pelayanan	Persyaratan	Mekanisme / prosedur	Biaya	Waktu	Keterangan
12	PENGINPUTAN PEGAWAI BARU	1. SK Pengangkatan 2. SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) 3. NPWP 4. Kartu Keluarga 5. Akte Nikah 6. Akte Anak 7. KTP anak 8. Nomor rekening gaji 9. Surat keterangan tidak tanggung menanggung dari instansi tempat bekerja /surah tempat tinggal 10. KP4 11. SK Perjanjian Kontrak untuk pegawai PPPK	1. Menyampaikan informasi tentang batas pengajuan usul penginputan pegawai baru kepada OPD 2. Menyampaikan informasi tentang batas pengajuan usul penginputan pegawai baru kepada OPD 3. Mengolah data usul penginputan pegawai baru dari OPD untuk dimasukkan kedalam aplikasi gaji	Rp. 0,-	± 30 Menit	
13	PENGINPUTAN PEGAWAI PINDAHAN	1. SK Pindah 2. SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) 3. KP4 4. SKPP dari asal daerah 5. Surat keterangan tidak tanggung menanggung dari instansi tempat bekerja /surah tempat tinggal 6. NPWP 7. Nomor rekening gaji 8. KTP 9. Kartu Keluarga 10. Akte Nikah 11. Akte Anak	1. Menyampaikan informasi tentang batas pengajuan usul penginputan pegawai pindahan/mutasi kepada OPD 2. Menghimpun usul penginputan pegawai pindahan/mutasi setiap bulannya yang dari OPD 3. Mengolah data usul penginputan pegawai pindahan/mutasi dari OPD untuk dimasukkan kedalam aplikasi gaji	Rp. 0,-	± 30 Menit	
14	PENERBITAN DAFTAR GAJI	Surat usul Pembuatan daftar gaji dari OPD	1. Menyampaikan informasi tentang batas pengajuan usul pembuatan daftar gaji setiap bulannya kepada OPD 2. Menghimpun usul pembuatan daftar gaji setiap bulannya yang telah dibuat OPD 3. Mengolah data usul pembuatan daftar gaji yang telah dibuat setiap OPD untuk penerbitan daftar gaji setiap bulannya	Rp. 0,-	Max 1 X 24 jam	
15	PERUBAHAN KENAIKAN PANGKAT	1. SK Pindah 2. SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) 3. KP4 4. SKPP dari asal daerah 5. Surat keterangan tidak tanggung menanggung dari instansi tempat bekerja /surah tempat tinggal 6. NPWP 7. Nomor rekening gaji 8. KTP 9. Kartu Keluarga 10. Akte Nikah 11. Akte Anak	1. Menyampaikan informasi tentang batas pengajuan usul penginputan pegawai pindahan/mutasi kepada OPD 2. Menghimpun usul penginputan pegawai pindahan/mutasi setiap bulannya yang dari OPD 3. Mengolah data usul penginputan pegawai pindahan/mutasi dari OPD untuk dimasukkan kedalam aplikasi gaji	Rp. 0,-	± 30 Menit	
16	PERUBAHAN KENAIKAN GAJI BERKALA	Fotocopy SK Kenaikan gaji berkala yg sudah dilegalisir	1. Menyampaikan informasi tentang batas waktu usul kenaikan gaji berkala PNS setiap periode pada tahun berjalan kepada setiap OPD 2. Menghimpun usul kenaikan gaji berkala PNS dari OPD sekaligus merekap usul untuk dikelompokkan disetiap periode 3. Mengolah data usul kenaikan gaji berkala untuk dicocokkan dengan periodenya masing-masing	Rp. 0,-	± 15 Menit	
17	PERUBAHAN TANGGUNGAN SUAMI/ISTRI ANAK	1. Akte Nikah 2. Akte Anak 3. KP4 4. Daftar Keluarga 5. Surat kuliah anak apabila sudah capai usia 21 tahun 6. Surat kematian suami/istri 7. Akte Cerai suami/istri	1. Menyampaikan informasi tentang batas waktu usul perubahan tanggungan suami/istri/anak setiap periode pada tahun berjalan kepada setiap OPD 2. Menghimpun usul perubahan tanggungan suami/istri/anak dari OPD sekaligus merekap usul untuk dikelompokkan disetiap periode 3. Mengolah data usul perubahan tanggungan suami/istri/anak untuk dicocokkan dengan periodenya masing-masing	Rp. 0,-	± 15 Menit	

Gambar 3.30 Lanjutan Standar Pelayanan 2

Pada Balei Pelayanan BPKPD telah dipersiapkan ruangan yang nyaman untuk wajib pajak dan masyarakat yang membutuhkan layanan secara tatap muka. Layanan ini hanya bersifat administrasi untuk seluruh pembayaran pajak langsung dibayarkan melalui kanal pembayaran digital maupun tunai di teller Bank Sumut. Ruang pelayanan khusus juga disediakan bagi masyarakat/ wajib pajak yang disabilitas. Selanjutnya, setiap hari Rabu bagi masyarakat/ wajib pajak diberikan konsumsi gratis di jam-jam tertentu yang disediakan oleh BPKPD.

LOKET KHUSUS



Gambar 3.31 Ruang Pelayanan Khusus

Bagi masyarakat/ wajib pajak yang hendak memberikan pengaduan terhadap seluruh layanan, juga disediakan ruang pengaduan dan juga media pengaduan. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan selanjutnya menjadi catatan untuk perbaikan.



Gambar 3.32 Ruang Pengaduan, Buku Pengaduan dan Kotak Kritik dan Saran, serta Tata cara menyampaikan pengaduan.

Kompensasi Pelayanan BPKPD juga dilaksanakan oleh BPKPD kepada wajib pajak/ warga yang tidak mendapat pelayanan sesuai standar pelayanan sebagai berikut :



Gambar 3.33 Kompensasi Wajib Pajak

3.1.2.7 Sasaran Strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 7
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Indikator 1
Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja

Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Sasaran strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Kinerja meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dengan target 85% telah terealisasi sebanyak 113.97% sehingga capaian kinerja BPKPD pada sasaran strategis peningkatan pendapatan asli daerah menjadi 134.08%.



Tabel 3.51

**Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja
Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	85,00%	113,97%	134,08%

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator
Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.**

Sasaran Strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memiliki indikator kinerja meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dengan target 85%. Setelah pengelolaan pajak dan retribusi daerah menggunakan aplikasi SOHEI maka mendapat hasil yang cukup signifikan. Berikut ditampilkan peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2022-2024 sebagai berikut :

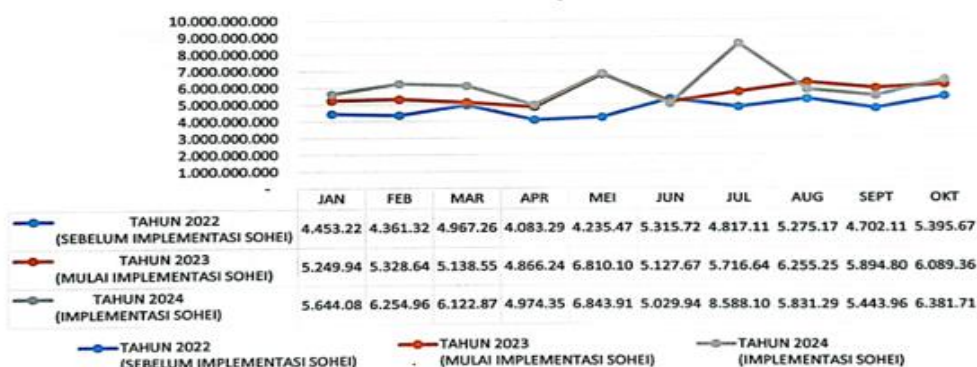
Tabel 3.52

PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA (DILUAR PBB & BPHTB)

BULAN	TAHUN 2022 (SEBELUM IMPLEMENTASI SOHEI)	TAHUN 2023 (MULAI IMPLEMENTASI SOHEI)	PERSENTASE PENINGKATAN (2022 VS 2023)	TAHUN 2024 (IMPLEMENTASI SOHEI)	PERSENTASE PENINGKATAN (2022 VS 2024)
JAN	4,453,224,453	5,249,940,674	18%	5,644,089,597	27%
FEB	4,361,323,378	5,328,645,679	22%	6,254,963,225	43%
MAR	4,967,265,923	5,138,559,632	3%	6,122,874,393	23%
APR	4,083,298,640	4,866,242,842	19%	4,974,356,361	22%
MEI	4,235,474,764	6,810,107,353	61%	6,843,913,523	62%
JUN	5,315,722,595	5,127,679,449	-4%	5,029,943,049	-5%
JUL	4,817,112,699	5,716,648,875	19%	8,588,102,512	78%
AUG	5,275,177,935	6,255,256,913	19%	5,831,291,123	11%
SEPT	4,702,119,032	5,894,808,643	25%	5,443,967,218	16%
OKT	5,395,674,253	6,089,363,761	13%	6,381,716,763	18%
TOTAL	47,606,393,672	56,477,253,821	20%	61,115,217,764	29%

Grafik 3.1

**GRAFIK PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAINNYA (DILUAR
PBB & BPHTB)**



Aplikasi SOHEI dirancang pada tahun 2022 dan mulai diimplementasikan dari tahun 2023 sampai saat ini. Manfaat dari implementasi SOHEI ini selain penatausahaan semakin baik, pelaporan semakin mudah adalah terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah setiap bulannya karena kepercayaan masyarakat menjadi meningkat terhadap penatausahaan pajak yang dapat diakses oleh masyarakat secara realtime.

Tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan daerah dengan rata-rata 20% setiap bulannya setelah mulai pelaksanaan aplikasi SOHEI. Selanjutnya, pada tahun 2024 peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat menjadi rata-rata 29% setiap bulannya.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

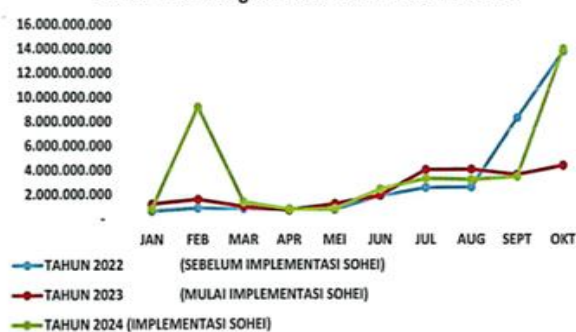
Tabel 3.53

PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PBB DAN BPHTB

BULAN	TAHUN 2022 (SEBELUM IMPLEMENTASI SOHEI)	TAHUN 2023 (MULAI IMPLEMENTASI SOHEI)	PERSENTASE PENINGKATAN (2022 VS 2023)	TAHUN 2024 (IMPLEMENTASI SOHEI)	PERSENTASE PENINGKATAN (2022 VS 2024)
JAN	626.283.439	1.204.388.604	92%	782.893.233	25%
FEB	871.783.848	1.596.083.497	83%	9.278.505.816	964%
MAR	819.582.570	1.016.687.623	24%	1.397.615.117	71%
APR	809.803.042	723.625.944	-11%	776.006.607	-4%
MEI	775.174.441	1.240.415.133	60%	834.747.548	8%
JUN	1.877.833.839	1.949.055.897	4%	2.467.871.904	31%
JUL	2.572.990.565	4.071.173.884	58%	3.338.816.198	30%
AUG	2.598.730.451	4.080.921.639	57%	3.233.770.434	24%
SEPT	8.330.525.588	3.624.652.679	-56%	3.463.513.057	-58%
OKT	13.824.931.468	4.379.063.885	-68%	14.025.132.563	1%
TOTAL	33.107.639.251	23.886.068.785	-28%	39.598.872.477	20%

Grafik 3.2

Grafik Perbandingan Penerimaan PBB dan BPHTB



Dari Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja setiap tahunnya yakni :

Tabel 3.54

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	71,00%	83,00%	95,00%	85,00%	113,97%	134,08%



3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Dalam mencapai target akhir rencana strategis yang telah disusun BPKPD tahun 2026 maka dapat dilihat tingkat kemajuan mencapai 126.63%, hal ini dikarenakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.55

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	113,97%	90,00%	126,63%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.



Tabel 3.56

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	113,97%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	134,08%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dengan menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan indikator kinerja meningkatkan pendapatan daerah dan retribusi daerah serta alternatif solusi yang telah dilakukan maka akan menjawab tantangan-tantangan kedepannya. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan yang belum di data menjadi tantangan sendiri bagi BPKPD dalam menjawab potensi Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 3.57
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	85,00%	113,97%	119,97%	Keberhasilan	Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.58
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realisasi anggaran (RARO)	capaian	AAROxCRO	Efisiensi (AAROxCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	85,00%	113,97%	134,08%	214.440.000,00	204.011.850,00	95,14%	287.526.197,65	83.514.347,65	38,95%



7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.59
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	119,97%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kualitas Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

3.1.2.8 Sasaran Strategis Peningkatan Pajak Daerah

Sasaran 8 Peningkatan Pajak Daerah Indikator 1 Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
--

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Sasaran Strategis Peningkatan Pajak Daerah memiliki indikator kinerja meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan target 85%. BPKPD selain menjangkau masyarakat dengan aplikasi yang dapat diakses dengan realtime dan mudah juga meningkatkan kesaran masyarakat dengan cara pendataan objek pajak baru,



sosialisai, literasi digital terkait pajak daerah, penertiban pajak daerah dan bekerjasama dengan Kejaksaan Simalungun melalui Surat Kuasa Khusus untuk menjangkau wajib pajak yang masih belum sadar pajak serta melaksanakan kegiatan yang menjangkau masyarakat akan pentingnya membayar pajak berupa Bulan Sadar Pajak bagi ASN dan Undian Gebyar QRIS ASIK.

Tabel 3.60

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	85,00%	90,00%	105,88%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Sasaran strategis peningkatan pajak daerah dengan indikator kinerja meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dari tahun 2021 sebesar 71% meningkat menjadi 90% di tahun 2024.

Tabel 3.61

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	71,00%	74,00%	83,00%	85,00%	90,00%	105,88%



BPKPD Kabupaten Simalungun menjangkau kesadaran masyarakat dengan cara memberi kuasa kepada Kejaksaan Negeri Simalungun dalam penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bagi wajib pajak yang terhutang pembayaran pajaknya.

Sesuai Kesepakatan bersama antara BPKPD Kabupaten Simalungun dengan Kejaksaan Negeri Simalungun tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari 50 (lima puluh) Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan yang telah terealisasi sebesar 33 (tiga puluh tiga) dan belum terealisasi sebesar 17 (tujuh belas) SKK.

Berikut gambaran pelaksanaan, yaitu :

Tabel 3.62

REKAP REALISASI SKK PIUTANG TA. 2021-2023								
URAIAN	PIUTANG		REALISASI		BELUM REALISASI		PERSENTASE	
	SKK	JUMLAH	SKK	JUMLAH	SKK	JUMLAH	SKK	JUMLAH
Pajak Hotel	8	Rp 61,684,014	5	Rp 38,259,350	3	Rp 24,137,864	63%	62%
Pajak Restoran	7	Rp 126,848,964	4	Rp 68,378,463	3	Rp 58,470,501	57%	54%
Pajak Parkir	2	Rp 9,420,564	1	Rp 802,200	1	Rp 8,618,364	50%	9%
Pajak Reklame	27	Rp 65,440,488	19	Rp 62,526,363	8	Rp 2,914,125	70%	96%
Pajak Galian C	1	Rp 84,982,500	1	Rp 84,982,500	-	Rp -	100%	100%
Pajak Air Tanah	5	Rp 117,710,232	3	Rp 115,775,016	2	Rp 1,935,216	60%	98%
Total	50	Rp 466,086,762	33	Rp 370,723,892	17	Rp 95,362,870	66%	80%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor: 973/279/BPKPD/2023
Nomor: 01/L.2.24/Gs.1/02/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (07-02-2023) bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. FRANS NOVENDY SARAGIH, :** Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- S.STP, M.Si**
- II. BOBBI SANDRI, SH, MH :** Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, yang berkedudukan di Jalan Asahan, Siantar, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Simalungun,

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

Gambar 3.34 Kesepakatan Bersama BPKPD dan Kejaksaan Negeri



3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Tabel 3.63

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	90,00%	90,00%	100,00%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Tabel 3.64

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	90,00%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	105,88%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Pelaksanaan Sasaran Strategi peningkatan Pajak Daerah dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah sosialisasi terkait pajak dilaksanakan oleh BPKPD

kepada wajib pajak di 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi kegiatan petugas pajak sebelum melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah.

Tabel 3.65

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	85,00%	90,00%	105,88%	Keberhasilan	Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.35 Sosialisasi KKPD kepada Pengusaha Hotel di Girsang Sipangan Bolon.

Literasi digital juga menjadi salah satu terobosan yang dilaksanakan BPKPD Kabupaten Simalungun yang dimaksudkan untuk mengedukasikan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. Tahun 2024 BPKPD Kabupaten Simalungun telah membuka 13 (tiga belas) kanal pembayaran digital. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin sehingga masyarakat semakin dipermudah dalam melakukan pembayaran.



Gambar 3.37 Literasi Digital Penggunaan QRIS Langsung kepada Pengusaha
Retribusi Sampah dan Retribusi Pasar Kecamatan Bandar



Gambar 3.36 Literasi Digital Penggunaan QRIS bagi Retribusi Sampah dan Retribusi Pasar Kecamatan Bandar

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Tabel 3.66

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realiasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)-RARO	Efisiensi RO Satker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	85,00%	90,00%	105,88%	3.680.765.000,00	3.157.633.850,00	85,79%	3.897.280.588,24	739.646.738,24	20,09%

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan



Pendapatan Daerah untuk menjangkau keberhasilan dalam mengoptimalkan pajak daerah.

Tabel 3.67

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Pajak Daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Peningkatan Pajak Daerah	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	105,88%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	Menunjang	Peningkatan Kesadaran Masyarakat didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Sadar Wajib Pajak bagi masyarakat dan ASN Kab.Simalungun pada tanggal 15-19 Juli 2024 dengan dirangkaikan Launching QRIS bagi kanal pembayaran Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital. Wajib Pajak yang menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran PBB-P2 akan diberikan apresiasi berupa hadiah menarik. Kegiatan ini dapat dilihat melalui link berikut :

1. <https://siantarcorner.com/badan-pkpd-simalungun-launching-qris-dan-e-commerce-sebagai-kanal-pembayaran-pbb-p2/>
2. <https://www.facebook.com/watch/?v=450089917860158&rdid=nSkYj2edJ596BWT7>
3. <https://newscorner.id/badan-pkpd-simalungun-launching-qris-dan-e-commerce-sebagai-kanal-pembayaran-pbb-p2/>

4. <https://www.armadanews.id/2024/07/22/badan-pkpd-simalungun-launching-qrisc-dan-e-commerce-sebagai-kanal-pembayaran-pbb-p2/>
5. <https://jurnal86.com/badan-pkpd-simalungun-launching-qrisc-dan-e-commerce-sebagai-kanal-pembayaran-pbb-p2/>
6. <https://www.garispolisi.com/2024/07/pemkab-simalungun-luncurkan-qrisc-dan-e.html?m=1>



Gambar 3.38 Pemberian Apresiasi bagi ASN yang membayar Pajak PBB-P2 menggunakan QRIS.



Gambar 3.39 Pemberian Apresiasi bagi masyarakat yang membayar Pajak PBB P2 menggunakan QRIS.

Pelaksanaan Gebyar QRIS ASIK bertujuan menjangkau masyarakat yang menjadi konsumen Restoran untuk membayar pajak menggunakan QRIS. Setiap konsumen yang menggunakan kanal pembayaran QRIS dalam bertransaksi dan melaporkan kepada aplikasi yang sudah di siapkan oleh BPKPD maka akan mendapat 1 (satu) kupon undian dengan syarat tertentu, selanjutnya kupon tersebut akan diundi pada kegiatan Gebyar QRIS ASIK tanggal 30 Desember 2024 secara live pada media sosial BPKPD dengan link sebagai berikut : <https://www.facebook.com/share/v/15yT2rBn6S/>



Gambar 3.40 Pelaksanaan Gebyar QRIS ASIK



3.1.2.9 Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Sasaran 9

Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Indikator 1

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi memiliki indikator kinerja terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah dengan target 85% dan telah terealisasi sebanyak 95% sehingga capaian kinerja menjadi 111.76%.

Tabel 3.68

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	85,00%	95,00%	111,76%



1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

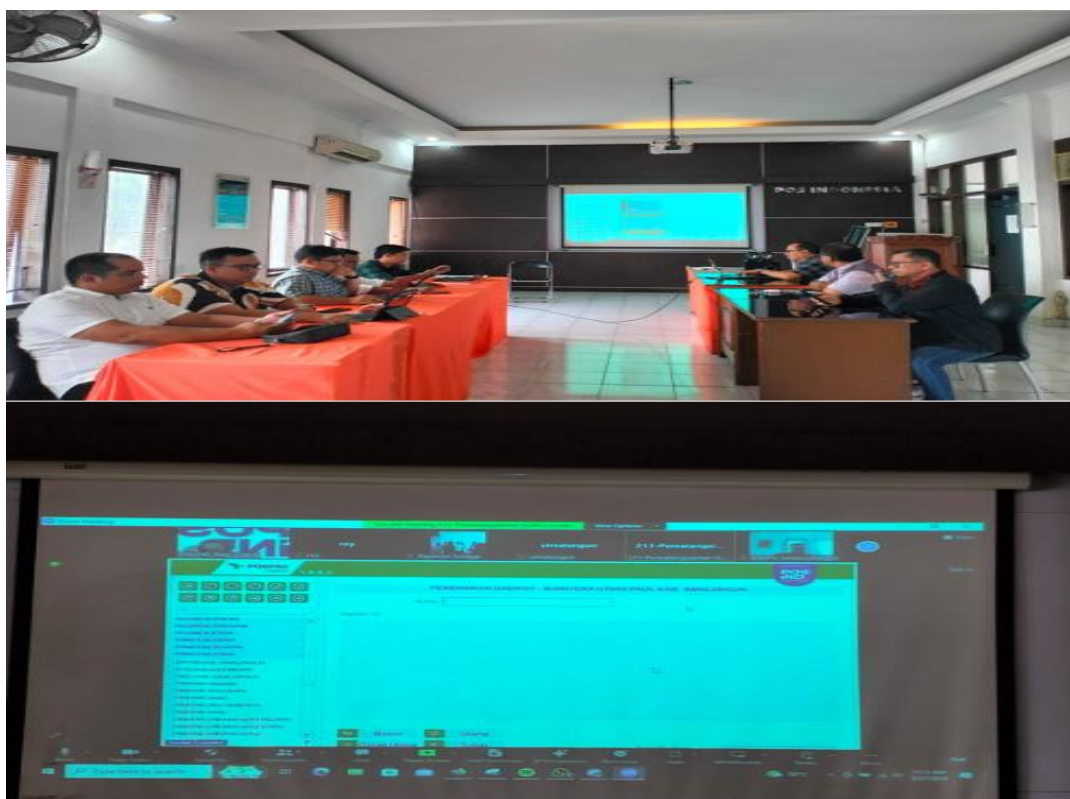
Sasaran strategis peningkatan pajak daerah dengan indikator kinerja meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dari tahun 2021 sebesar 74% meningkat menjadi 85% di tahun 2024.

Tabel 3.69

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Indikator Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Realisasi			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	74%	75%	80%	85%	95%	111,76%

Hal ini disebabkan aparatur pengelola pendapatan daerah senantiasa dibekali keterampilan-keterampilan yang mendukung kinerjanya melalui coaching klinik, Focus Grup Discussion, bimbingan teknis dan lainnya sehingga kemampuan aparatur pengelola pendapatan semakin berkembang. Berikut disampaikan gambar pelaksanaan kegiatan aparatur pengelola pendapatan :



Gambar 3.41 Uji Aplikasi dengan Kantor POS .



Gambar 3.42 Sosialisasi Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



Gambar 3.43 Pendataan Objek Pajak Baru



Gambar 3.44 Penertiban Pajak Reklame



Gambar 3.43 Focus Grup Discussion pelaksanaan Opsen PKN dan Opsen BBNKB



2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Perbandingan realisasi indikator kinerja terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi tahun 2024 dengan target akhir rencana strategis BPKPD Kab.Simalungun dimaksudkan untuk melihat tingkat kemajuan yang dicapai BPKPD hingga tahun akhir rencana strategis BPKPD ditetapkan.

Tabel 3.70

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis BPKPD Kab.Simalungun.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	95,00%	95,00%	100,00%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Tabel 3.71

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.



Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya	Capaian
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	95,00%	Tidak ada perbandingan dengan standar Nasional	111,76%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena ASN yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara berkesinambungan dilibatkan dalam sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, maupun bimbingan teknis sehingga wawasan, pengetahuan dan keterampilan semakin berkembang, selanjutnya penggunaan aplikasi yang memungkinkan ASN mampu mengelola pekerjaan yang diampunya dan juga membantu masyarakat dalam kemudahan pembayaran pajak daerah secara tepat dan *realtime*.



Tabel 3.72

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi/ Upaya yang Dilakukan
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	85,00%	95,00%	111,76%	Keberhasilan	Peningkatan aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

Tabel 3.73

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

Sasaran	Indikator	target	realisasi	capaian (CRO)	alokasi anggaran (AARO)	realiasi anggaran (RARO)	capaian	AAROXCRO	Efisiensi (AAROXCRO)-RARO	Efisiensi RO Sarker
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x5	10=9-7	11
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki	85,00%	95,00%	111,76%	700.400.000,00	645.089.450,00	92,10%	782.800.000,00	137.710.550,00	19,66%



6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

Pelaksanaan Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi dimaksudkan untuk menilai seberapa jauh program dan kegiatan yang ditetapkan dapat mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.74

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atapun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah Yang Berdedikasi Tinggi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Peningkatan Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.	Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah	111,76%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	Menunjang	PeningkatanKepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. didukung oleh sistem informasi pemerintah daerah yang berbasis online dan aplikasi sehingga stakeholder dapat mengakses informasi secara realtime.

Penambahan kanal pembayaran digital juga menjadi program unggulan BPKPD yang berkomitmen menjangkau masyarakat dengan pembayaran secara digital. Pelaksanananya dengan cara bekerjasama dengan dompet digital, e-commerce, mobile banking yang langsung host to host dengan aplikasi yang dibangun oleh BPKPD Kabupaten Simalungun. Sepanjang tahun 2023-2024 kanal pembayaran digital



dilaksanakan secara bertahap dan total sebanyak 13 kanal pembayaran telah bekerja sama dengan BPKPD Kabupaten Simalungun dan menjadi kebanggaan bagi BPKPD Kabupaten Simalungun yang pertama kali bekerja sama terbanyak se-Sumatera Utara dengan dompet-dompet digital tersebut, yakni :

Tabel 3.75

REKAP PAJAK DAERAH YANG SUDAH TERSEDIA FASILITAS PEMBAYARAN ONLINE :

NO	JENIS PAJAK DAERAH	PEMBAYARAN ONLINE
1	Pajak Bumi Bangunan	m-Banking Bank Sumut, Tokopedia, Indomaret, Shopee, BRImo, Traveloka, Pospay, Agen Sumut Link, Qris, Gojek
2	BPHTB	m-Banking Bank Sumut
3	Pajak Reklame	Teller Bank Sumut, ATM Bank Sumut, Banking Bank Sumut, Tokopedia, Agen Sumut Link, QRIS, Pospay
4	Pajak Air Tanah	Teller Bank Sumut, ATM Bank Sumut, Banking Bank Sumut, Tokopedia, Agen Sumut Link, QRIS, Pospay
5	PEBJT : 1. Jasa Perhotelan 2. Jasa Makanan dan atau Minuman 3. Jasa Kesenian dan Hiburan 4. Tenaga Listrik 5. Penyediaan Parkir	Teller Bank Sumut, ATM Bank Sumut, Banking Bank Sumut, Tokopedia, Agen Sumut Link, QRIS, Pospay
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Teller Bank Sumut, ATM Bank Sumut, Banking Bank Sumut, Tokopedia, Agen Sumut Link, QRIS, Pospay
7	Pajak Sarang Burung Walet	Teller Bank Sumut, ATM Bank Sumut, Banking Bank Sumut, Tokopedia, Agen Sumut Link, Pospay

Dengan menggunakan kanal pembayaran sangat mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga dengan demikian, kesadaran wajib pajak juga diharapkan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun. Berikut tabel realisasi



anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2024.

Tabel. 3.76
Realisasi Anggaran Tahun

No	Program/ Kegiatan	Capaian 2024		
		Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	102.502.823.811	93.123.819.833,00	90,85
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	532.338.768.400	528.735.779.367,20	99,32
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.596.983.220	2.425.199.037,00	67,42
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.595.605.000	4.006.735.150,00	87,19
	JUMLAH	643.034.180.431,00	628.291.533.387,20	97,71

Anggaran belanja dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2024 dengan anggaran Rp. 643.034.180.431,00 dengan realisasi sebesar Rp.628.291.533.387,2 atau (97,71%). Adapun penjabaran teknis mengenai program dan sub kegiatan sasaran belanja langsung tercantum dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun. Program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel. 3.77
Rincian Realisasi Anggaran

ode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2024		
		Anggaran	Realisasi	Persentase
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	643.034.180.431,00	628.291.533.387,20	97,71%
5.02	KEUANGAN	643.034.180.431,00	628.291.533.387,20	97,71%
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	643.034.180.431,00	628.291.533.387,20	97,71%
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.502.823.811,00	93.123.819.833,00	90,85%
5.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.658.000,00	66.202.000,00	87,50%
5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.520.000,00	11.185.000,00	77,03%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	11.185.000,00	77,03%
5.02	Belanja Barang	1.000.000,00	875.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	875.000,00	87,50%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000,00	875.000,00	87,50%
5.02	Belanja Jasa	13.520.000,00	10.310.000,00	76,26%
5.02	Belanja Jasa Kantor	13.520.000,00	10.310.000,00	76,26%
5.02	Belanja Lembur	13.520.000,00	10.310.000,00	76,26%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.044.000,00	910.000,00	87,16%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	1.044.000,00	910.000,00	87,16%
5.02	Belanja Barang	1.044.000,00	910.000,00	87,16%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang Pakai Habis	1.044.000,00	910.000,00	87,16%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.044.000,00	910.000,00	87,16%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.282.000,00	23.450.000,00	89,22%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	26.282.000,00	23.450.000,00	89,22%
5.02	Belanja Barang	612.000,00	550.000,00	89,87%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	612.000,00	550.000,00	89,87%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	612.000,00	550.000,00	89,87%
5.02	Belanja Jasa	25.670.000,00	22.900.000,00	89,21%
5.02	Belanja Jasa Kantor	25.670.000,00	22.900.000,00	89,21%
5.02	Belanja Lembur	25.670.000,00	22.900.000,00	89,21%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930.000,00	812.000,00	87,31%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	812.000,00	87,31%
5.02	Belanja Barang	930.000,00	812.000,00	87,31%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	930.000,00	812.000,00	87,31%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	930.000,00	812.000,00	87,31%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.240.000,00	1.085.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	1.085.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang	1.240.000,00	1.085.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	1.240.000,00	1.085.000,00	87,50%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.240.000,00	1.085.000,00	87,50%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.642.000,00	27.010.000,00	91,12%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	29.642.000,00	27.010.000,00	91,12%
5.02	Belanja Barang	2.612.000,00	2.300.000,00	88,06%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	2.612.000,00	2.300.000,00	88,06%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	612.000,00	550.000,00	89,87%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Jasa	27.030.000,00	24.710.000,00	91,42%
5.02	Belanja Jasa Kantor	27.030.000,00	24.710.000,00	91,42%
5.02	Belanja Lembur	27.030.000,00	24.710.000,00	91,42%
5.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.118.572.611,00	52.589.007.756,00	88,96%
5.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.844.002.611,00	52.327.453.956,00	88,93%
5.02	Belanja Pegawai	38.113.439.907,00	31.841.557.885,00	83,54%
5.02	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.561.392.089,00	21.170.824.045,00	82,82%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Gaji Pokok ASN	10.302.935.543,00	8.706.018.959,00	84,50%
5.02	Belanja Gaji Pokok PNS	10.302.935.543,00	8.706.018.959,00	84,50%
5.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	866.789.394,00	796.389.104,00	91,88%
5.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	866.789.394,00	796.389.104,00	91,88%
5.02	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	765.457.000,00	597.250.000,00	78,03%
5.02	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	765.457.000,00	597.250.000,00	78,03%
5.02	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	85.715.000,00	85.715.000,00	100,00%
5.02	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	85.715.000,00	85.715.000,00	100,00%
5.02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	286.528.200,00	162.605.000,00	56,75%
5.02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	286.528.200,00	162.605.000,00	56,75%
5.02	Belanja Tunjangan Beras ASN	542.020.248,00	468.050.460,00	86,35%
5.02	Belanja Tunjangan Beras PNS	542.020.248,00	468.050.460,00	86,35%
5.02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	104.087.314,00	7.968.992,00	7,66%
5.02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	104.087.314,00	7.968.992,00	7,66%
5.02	Belanja Pembulatan Gaji ASN	129.983,00	118.801,00	91,40%
5.02	Belanja Pembulatan Gaji PNS	129.983,00	118.801,00	91,40%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.501.712.139,00	10.273.148.178,00	82,17%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.501.712.139,00	10.273.148.178,00	82,17%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	39.632.008,00	35.141.143,00	88,67%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	39.632.008,00	35.141.143,00	88,67%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	66.385.260,00	38.418.408,00	57,87%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	66.385.260,00	38.418.408,00	57,87%
5.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.109.432.000,00	4.656.474.459,00	76,22%
5.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.109.432.000,00	4.656.474.459,00	76,22%
5.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.109.432.000,00	4.656.474.459,00	76,22%
5.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.442.615.818,00	6.014.259.381,00	93,35%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.442.615.818,00	6.014.259.381,00	93,35%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	270.000.000,00	269.999.991,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	62.500.000,00	62.499.979,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	80.000.000,00	79.999.999,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.012.500.000,00	1.012.499.987,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	156.966.453,00	156.966.447,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000,00	204.999.958,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.178.828.198,00	2.178.828.198,00	100,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.113.614.319,00	835.210.740,00	75,00%
5.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(,PB,JT),	1.363.206.848,00	1.213.254.082,00	89,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	20.730.562.704,00	20.485.896.071,00	98,82%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Jasa	20.730.562.704,00	20.485.896.071,00	98,82%
5.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.730.562.704,00	20.485.896.071,00	98,82%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.278.940.304,00	11.102.325.081,00	98,43%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.336.263.680,00	5.303.393.316,00	99,38%
5.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.115.358.720,00	4.080.177.674,00	99,15%
5.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.860.000,00	193.394.050,00	95,33%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	202.860.000,00	193.394.050,00	95,33%
5.02	Belanja Barang	1.250.000,00	1.093.050,00	87,44%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.093.050,00	87,44%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	1.093.050,00	87,44%
5.02	Belanja Jasa	201.610.000,00	192.301.000,00	95,38%
5.02	Belanja Jasa Kantor	201.610.000,00	192.301.000,00	95,38%
5.02	Belanja Lembur	201.610.000,00	192.301.000,00	95,38%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.750.000,00	38.313.000,00	98,87%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	38.313.000,00	98,87%
5.02	Belanja Barang	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50%
5.02	Belanja Jasa	36.750.000,00	36.563.000,00	99,49%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Jasa Kantor	36.750.000,00	36.563.000,00	99,49%
5.02	Belanja Lembur	36.750.000,00	36.563.000,00	99,49%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.960.000,00	29.846.750,00	90,55%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	29.846.750,00	90,55%
5.02	Belanja Barang	1.250.000,00	1.093.750,00	87,50%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.093.750,00	87,50%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	1.093.750,00	87,50%
5.02	Belanja Jasa	31.710.000,00	28.753.000,00	90,67%
5.02	Belanja Jasa Kantor	31.710.000,00	28.753.000,00	90,67%
5.02	Belanja Lembur	31.710.000,00	28.753.000,00	90,67%
5.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.802.284.100,00	7.091.747.586,00	90,89%
5.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.556.000,00	54.308.526,00	81,60%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	66.556.000,00	54.308.526,00	81,60%
5.02	Belanja Barang	66.556.000,00	54.308.526,00	81,60%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	66.556.000,00	54.308.526,00	81,60%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	66.556.000,00	54.308.526,00	81,60%
5.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	994.870.100,00	776.345.100,00	78,03%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	994.870.100,00	776.345.100,00	78,03%
5.02	Belanja Barang	994.870.100,00	776.345.100,00	78,03%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	994.870.100,00	776.345.100,00	78,03%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	519.056.600,00	400.934.220,00	77,24%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	137.320.000,00	118.889.325,00	86,58%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	261.635.000,00	196.143.105,00	74,97%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.475.000,00	26.640.000,00	62,72%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.383.500,00	33.738.450,00	98,12%
5.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.514.000,00	98.017.900,00	82,71%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	118.514.000,00	98.017.900,00	82,71%
5.02	Belanja Barang	118.514.000,00	98.017.900,00	82,71%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	118.514.000,00	98.017.900,00	82,71%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	107.274.000,00	87.504.350,00	81,57%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.240.000,00	10.513.550,00	93,54%
5.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	719.010.000,00	664.522.225,00	92,42%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	719.010.000,00	664.522.225,00	92,42%
5.02	Belanja Barang	719.010.000,00	664.522.225,00	92,42%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	719.010.000,00	664.522.225,00	92,42%
5.02	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
5.02	Belanja Natura dan Pakan-Natura	204.510.000,00	201.817.225,00	98,68%
5.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	255.000.000,00	238.250.000,00	93,43%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	255.000.000,00	219.955.000,00	86,26%
5.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.590.000,00	93.374.865,00	87,60%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	106.590.000,00	93.374.865,00	87,60%
5.02	Belanja Barang	106.590.000,00	93.374.865,00	87,60%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	106.590.000,00	93.374.865,00	87,60%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	106.590.000,00	93.374.865,00	87,60%
5.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.544.000,00	4.800.000,00	86,58%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	5.544.000,00	4.800.000,00	86,58%
5.02	Belanja Jasa	5.544.000,00	4.800.000,00	86,58%
5.02	Belanja Jasa Kantor	5.544.000,00	4.800.000,00	86,58%
5.02	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.544.000,00	4.800.000,00	86,58%
5.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.791.200.000,00	5.400.378.970,00	93,25%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	5.791.200.000,00	5.400.378.970,00	93,25%
5.02	Belanja Jasa	541.200.000,00	528.700.000,00	97,69%
5.02	Belanja Jasa Kantor	541.200.000,00	528.700.000,00	97,69%
5.02	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	541.200.000,00	528.700.000,00	97,69%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000.000,00	4.871.678.970,00	92,79%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000.000,00	4.871.678.970,00	92,79%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000.000,00	2.621.828.970,00	87,39%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000.000,00	2.249.850.000,00	99,99%
5.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.073.554.500,00	1.947.329.333,00	93,91%
5.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.073.554.500,00	1.947.329.333,00	93,91%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	209.844.000,00	201.739.500,00	96,14%
5.02	Belanja Barang	209.844.000,00	201.739.500,00	96,14%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	209.844.000,00	201.739.500,00	96,14%
5.02	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.500.000,00	40.459.500,00	99,90%
5.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	169.344.000,00	161.280.000,00	95,24%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.863.710.500,00	1.745.589.833,00	93,66%
5.02	Belanja Modal Alat Angkutan	126.528.000,00	113.093.400,00	89,38%
5.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	120.000.000,00	107.610.000,00	89,68%
5.02	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	120.000.000,00	107.610.000,00	89,68%
5.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.528.000,00	5.483.400,00	84,00%
5.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	6.528.000,00	5.483.400,00	84,00%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.282.566.500,00	1.191.691.964,00	92,91%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor	1.047.677.200,00	968.008.000,00	92,40%
5.02	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.102.300,00	-	0,00%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.035.574.900,00	968.008.000,00	93,48%
5.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	234.889.300,00	223.683.964,00	95,23%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Modal Mebel	124.851.000,00	117.538.214,00	94,14%
5.02	Belanja Modal Alat Pembersih	3.873.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.144.500,00	105.125.750,00	99,98%
5.02	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
5.02	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	750.000,00	600.000,00	80,00%
5.02	Belanja Modal Alat Studio	750.000,00	600.000,00	80,00%
5.02	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	750.000,00	600.000,00	80,00%
5.02	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.100.000,00	3.749.469,00	73,52%
5.02	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.100.000,00	3.749.469,00	73,52%
5.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.100.000,00	3.749.469,00	73,52%
5.02	Belanja Modal Komputer	448.766.000,00	436.455.000,00	97,26%
5.02	Belanja Modal Komputer Unit	365.620.000,00	360.500.000,00	98,60%
5.02	Belanja Modal Personal Computer	267.120.000,00	264.500.000,00	99,02%
5.02	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	98.500.000,00	96.000.000,00	97,46%
5.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	83.146.000,00	75.955.000,00	91,35%
5.02	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	83.146.000,00	75.955.000,00	91,35%
5.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.939.474.600,00	30.356.827.844,00	95,04%
5.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.991.800,00	8.540.000,00	85,47%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	9.991.800,00	8.540.000,00	85,47%
5.02	Belanja Barang	9.991.800,00	8.540.000,00	85,47%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang Pakai Habis	9.991.800,00	8.540.000,00	85,47%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.991.800,00	8.540.000,00	85,47%
5.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.143.082.800,00	27.626.687.844,00	94,80%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	29.143.082.800,00	27.626.687.844,00	94,80%
5.02	Belanja Jasa	29.143.082.800,00	27.626.687.844,00	94,80%
5.02	Belanja Jasa Kantor	29.143.082.800,00	27.626.687.844,00	94,80%
5.02	Belanja Tagihan Air	10.960.000,00	6.479.560,00	59,12%
5.02	Belanja Tagihan Listrik	28.472.122.800,00	27.111.058.442,00	95,22%
5.02	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	660.000.000,00	509.149.842,00	77,14%
5.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.786.400.000,00	2.721.600.000,00	97,67%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	2.786.400.000,00	2.721.600.000,00	97,67%
5.02	Belanja Jasa	2.786.400.000,00	2.721.600.000,00	97,67%
5.02	Belanja Jasa Kantor	2.786.400.000,00	2.721.600.000,00	97,67%
5.02	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.692.800.000,00	2.628.000.000,00	97,59%
5.02	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00%
5.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.280.000,00	1.072.705.314,00	71,84%
5.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	954.420.000,00	583.314.564,00	61,12%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	954.420.000,00	583.314.564,00	61,12%
5.02	Belanja Jasa	60.400.000,00	30.612.097,00	50,68%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Jasa Kantor	60.400.000,00	30.612.097,00	50,68%
5.02	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.400.000,00	30.612.097,00	50,68%
5.02	Belanja Pemeliharaan	894.020.000,00	552.702.467,00	61,82%
5.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	894.020.000,00	552.702.467,00	61,82%
5.02	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	894.020.000,00	552.702.467,00	61,82%
5.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	418.600.000,00	416.467.000,00	99,49%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	418.600.000,00	416.467.000,00	99,49%
5.02	Belanja Pemeliharaan	418.600.000,00	416.467.000,00	99,49%
5.02	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	418.600.000,00	416.467.000,00	99,49%
5.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	418.600.000,00	416.467.000,00	99,49%
5.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.260.000,00	72.923.750,00	60,64%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	120.260.000,00	72.923.750,00	60,64%
5.02	Belanja Pemeliharaan	120.260.000,00	72.923.750,00	60,64%
5.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.260.000,00	72.923.750,00	60,64%
5.02	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	22.960.000,00	9.100.000,00	39,63%
5.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	97.300.000,00	63.823.750,00	65,59%
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	532.338.768.400,00	528.735.779.367,20	99,32%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.139.746.300,00	1.234.189.143,00	57,68%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	37.478.000,00	26.281.087,00	70,12%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	37.478.000,00	26.281.087,00	70,12%
5.02	Belanja Barang	37.478.000,00	26.281.087,00	70,12%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	37.478.000,00	26.281.087,00	70,12%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.298.000,00	1.170.000,00	90,14%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.180.000,00	25.111.087,00	69,41%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.031.600,00	49.855.928,00	49,84%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	100.031.600,00	49.855.928,00	49,84%
5.02	Belanja Barang	100.031.600,00	49.855.928,00	49,84%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	100.031.600,00	49.855.928,00	49,84%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.596.000,00	2.532.465,00	97,55%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.688.000,00	38.665.463,00	54,70%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.747.600,00	8.658.000,00	32,37%
5.02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	22.597.500,00	11.311.793,00	50,06%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	22.597.500,00	11.311.793,00	50,06%
5.02	Belanja Barang	22.597.500,00	11.311.793,00	50,06%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	22.597.500,00	11.311.793,00	50,06%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.298.000,00	1.170.000,00	90,14%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.450.000,00	10.141.793,00	97,05%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.849.500,00	-	0,00%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	747.063.500,00	524.080.596,00	70,15%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	747.063.500,00	524.080.596,00	70,15%
5.02	Belanja Barang	229.023.500,00	133.354.014,00	58,23%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	229.023.500,00	133.354.014,00	58,23%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.894.000,00	3.571.425,00	91,72%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.878.000,00	112.244.589,00	63,82%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.251.500,00	17.538.000,00	35,61%
5.02	Belanja Jasa	318.040.000,00	228.546.000,00	71,86%
5.02	Belanja Jasa Kantor	318.040.000,00	228.546.000,00	71,86%
5.02	Belanja Lembur	318.040.000,00	228.546.000,00	71,86%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	162.180.582,00	81,09%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000.000,00	162.180.582,00	81,09%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00	162.180.582,00	81,09%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.009.374.600,00	450.754.225,00	44,66%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	1.009.374.600,00	450.754.225,00	44,66%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang	430.854.600,00	106.268.904,00	24,66%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	430.854.600,00	106.268.904,00	24,66%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.245.000,00	3.181.815,00	98,05%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.556.600,00	103.087.089,00	29,49%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	78.053.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	403.520.000,00	234.806.000,00	58,19%
5.02	Belanja Jasa Kantor	403.520.000,00	234.806.000,00	58,19%
5.02	Belanja Lembur	403.520.000,00	234.806.000,00	58,19%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	109.679.321,00	62,67%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	175.000.000,00	109.679.321,00	62,67%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.000.000,00	109.679.321,00	62,67%
5.02	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	223.201.100,00	171.905.514,00	77,02%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	223.201.100,00	171.905.514,00	77,02%
5.02	Belanja Barang	91.343.100,00	79.897.514,00	87,47%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	91.343.100,00	79.897.514,00	87,47%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.704.000,00	4.084.800,00	71,61%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	973.500,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.815.600,00	11.830.214,00	85,63%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	68.850.000,00	63.982.500,00	92,93%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	124.750.000,00	88.200.000,00	70,70%
5.02	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	7.200.000,00	70,94%
5.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.150.000,00	7.200.000,00	70,94%
5.02	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	114.600.000,00	81.000.000,00	70,68%
5.02	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	114.600.000,00	81.000.000,00	70,68%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	7.108.000,00	3.808.000,00	53,57%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.108.000,00	3.808.000,00	53,57%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.108.000,00	3.808.000,00	53,57%
5.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.475.512.500,00	1.195.655.954,00	81,03%
5.02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98.333.800,00	34.321.000,00	34,90%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	98.333.800,00	34.321.000,00	34,90%
5.02	Belanja Barang	31.033.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	31.033.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.968.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.344.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.721.800,00	-	0,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Jasa	67.300.000,00	34.321.000,00	51,00%
5.02	Belanja Jasa Kantor	67.300.000,00	34.321.000,00	51,00%
5.02	Belanja Lembur	67.300.000,00	34.321.000,00	51,00%
5.02	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.637.100,00	145.659.204,00	58,12%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	250.637.100,00	145.659.204,00	58,12%
5.02	Belanja Barang	23.637.100,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	23.637.100,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.837.500,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.958.400,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.241.200,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	227.000.000,00	145.659.204,00	64,17%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.000.000,00	145.659.204,00	64,17%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00	145.659.204,00	72,83%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000,00	-	0,00%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	497.724.000,00	447.731.900,00	89,96%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang dan Jasa	497.724.000,00	447.731.900,00	89,96%
5.02	Belanja Barang	139.438.000,00	103.312.900,00	74,09%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	139.438.000,00	103.312.900,00	74,09%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.452.000,00	13.875.000,00	54,51%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	109.346.000,00	87.845.400,00	80,34%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	1.592.500,00	79,63%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.640.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	358.286.000,00	344.419.000,00	96,13%
5.02	Belanja Jasa Kantor	358.286.000,00	344.419.000,00	96,13%
5.02	Belanja Lembur	358.286.000,00	344.419.000,00	96,13%
5.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	628.817.600,00	567.943.850,00	90,32%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	628.817.600,00	567.943.850,00	90,32%
5.02	Belanja Barang	150.483.600,00	101.159.850,00	67,22%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	150.483.600,00	101.159.850,00	67,22%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.630.000,00	38.850.000,00	61,06%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.344.000,00	7.142.850,00	97,26%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.760.000,00	52.170.000,00	79,33%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.749.600,00	2.997.000,00	21,80%
5.02	Belanja Jasa	478.334.000,00	466.784.000,00	97,59%
5.02	Belanja Jasa Kantor	478.334.000,00	466.784.000,00	97,59%
5.02	Belanja Lembur	478.334.000,00	466.784.000,00	97,59%
5.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.456.969.700,00	1.252.952.024,00	86,00%
5.02	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	293.780.700,00	245.691.810,00	83,63%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	293.780.700,00	245.691.810,00	83,63%
5.02	Belanja Barang	36.836.700,00	30.937.810,00	83,99%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	36.836.700,00	30.937.810,00	83,99%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.571.000,00	3.195.000,00	89,47%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.568.000,00	4.004.350,00	87,66%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.697.700,00	23.738.460,00	82,72%
5.02	Belanja Jasa	256.944.000,00	214.754.000,00	83,58%
5.02	Belanja Jasa Kantor	256.944.000,00	214.754.000,00	83,58%
5.02	Belanja Lembur	256.944.000,00	214.754.000,00	83,58%
5.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	349.339.500,00	306.464.500,00	87,73%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	349.339.500,00	306.464.500,00	87,73%
5.02	Belanja Barang	32.719.500,00	16.345.500,00	49,96%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang Pakai Habis	32.719.500,00	16.345.500,00	49,96%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.980.000,00	4.357.500,00	87,50%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.719.500,00	11.988.000,00	44,87%
5.02	Belanja Jasa	316.620.000,00	290.119.000,00	91,63%
5.02	Belanja Jasa Kantor	316.620.000,00	290.119.000,00	91,63%
5.02	Belanja Lembur	316.620.000,00	290.119.000,00	91,63%
5.02	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	607.291.000,00	534.406.599,00	88,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	607.291.000,00	534.406.599,00	88,00%
5.02	Belanja Barang	74.725.000,00	59.240.270,00	79,28%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	74.725.000,00	59.240.270,00	79,28%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.319.000,00	6.640.200,00	90,73%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.330.000,00	28.712.870,00	67,83%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.076.000,00	23.887.200,00	95,26%
5.02	Belanja Jasa	297.566.000,00	269.248.000,00	90,48%
5.02	Belanja Jasa Kantor	297.566.000,00	269.248.000,00	90,48%
5.02	Belanja Lembur	297.566.000,00	269.248.000,00	90,48%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	205.918.329,00	87,62%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	235.000.000,00	205.918.329,00	87,62%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	235.000.000,00	205.918.329,00	87,62%
5.02	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	193.600.000,00	155.469.015,00	80,30%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	193.600.000,00	155.469.015,00	80,30%
5.02	Belanja Barang	98.288.000,00	75.310.715,00	76,62%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	98.288.000,00	75.310.715,00	76,62%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.894.000,00	3.190.000,00	81,92%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.892.000,00	49.960.675,00	69,49%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.502.000,00	22.160.040,00	98,48%
5.02	Belanja Jasa	45.312.000,00	38.320.000,00	84,57%
5.02	Belanja Jasa Kantor	45.312.000,00	38.320.000,00	84,57%
5.02	Belanja Lembur	45.312.000,00	38.320.000,00	84,57%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	41.838.300,00	83,68%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00	41.838.300,00	83,68%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	41.838.300,00	83,68%
5.02	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10.299.500,00	9.637.600,00	93,57%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang dan Jasa	10.299.500,00	9.637.600,00	93,57%
5.02	Belanja Barang	10.299.500,00	9.637.600,00	93,57%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	10.299.500,00	9.637.600,00	93,57%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	973.500,00	580.000,00	59,58%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.326.000,00	9.057.600,00	97,12%
5.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2.659.000,00	1.282.500,00	48,23%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	2.659.000,00	1.282.500,00	48,23%
5.02	Belanja Barang	2.659.000,00	1.282.500,00	48,23%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	2.659.000,00	1.282.500,00	48,23%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.459.000,00	582.500,00	39,92%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	700.000,00	58,33%
5.02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	527.266.539.900,00	525.052.982.246,20	99,58%
5.02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Hibah kepada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%
5.02	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	525.266.539.900,00	523.052.982.246,20	99,58%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56%
5.02	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56%
5.02	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56%
5.02	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56%
5.02	Belanja Bagi Hasil	158.597.685.900,00	158.384.615.070,20	99,87%
5.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00	158.384.615.070,20	99,87%
5.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00	158.384.615.070,20	99,87%
5.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00	158.384.615.070,20	99,87%
5.02	Belanja Bantuan Keuangan	343.668.854.000,00	343.840.397.928,00	100,05%
5.02	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	343.668.854.000,00	343.840.397.928,00	100,05%
5.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	343.668.854.000,00	343.840.397.928,00	100,05%
5.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	343.668.854.000,00	343.840.397.928,00	100,05%
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.596.983.220,00	2.425.199.037,00	67,42%
5.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.596.983.220,00	2.425.199.037,00	67,42%
5.02	Penyusunan Standar Harga	400.353.000,00	281.032.624,00	70,20%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	400.353.000,00	281.032.624,00	70,20%
5.02	Belanja Barang	35.373.000,00	20.633.624,00	58,33%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	35.373.000,00	20.633.624,00	58,33%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.245.000,00	3.181.815,00	98,05%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.128.000,00	17.451.809,00	54,32%
5.02	Belanja Jasa	364.980.000,00	260.399.000,00	71,35%
5.02	Belanja Jasa Kantor	364.980.000,00	260.399.000,00	71,35%
5.02	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	173.100.000,00	131.100.000,00	75,74%
5.02	Belanja Lembur	191.880.000,00	129.299.000,00	67,39%
5.02	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	61.485.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	61.485.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang	26.485.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	26.485.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.060.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.770.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.755.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.900.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	936.099.200,00	776.810.675,00	82,98%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	924.879.200,00	765.988.175,00	82,82%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang	70.277.200,00	51.189.650,00	72,84%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	70.277.200,00	51.189.650,00	72,84%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.508.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.850.000,00	2.000.000,00	34,19%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.918.400,00	49.189.650,00	86,42%
5.02	Belanja Jasa	779.602.000,00	645.973.940,00	82,86%
5.02	Belanja Jasa Kantor	779.602.000,00	645.973.940,00	82,86%
5.02	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.000.000,00	99.515.940,00	99,52%
5.02	Belanja Lembur	679.602.000,00	546.458.000,00	80,41%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	68.824.585,00	91,77%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.000.000,00	68.824.585,00	91,77%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000,00	68.824.585,00	91,77%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.220.000,00	10.822.500,00	96,46%
5.02	Belanja Modal Komputer	11.220.000,00	10.822.500,00	96,46%
5.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.220.000,00	10.822.500,00	96,46%
5.02	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.220.000,00	10.822.500,00	96,46%
5.02	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.424.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	47.424.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang	36.924.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	36.924.000,00	-	0,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.060.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.864.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.314.413.820,00	969.910.138,00	73,79%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.413.820,00	695.310.138,00	66,89%
5.02	Belanja Barang	385.270.900,00	120.348.990,00	31,24%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	385.270.900,00	120.348.990,00	31,24%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.144.300,00	13.790.640,00	62,28%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.557.800,00	17.532.450,00	94,47%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.432.000,00	31.940.250,00	34,56%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.700.000,00	7.230.000,00	61,79%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	240.436.800,00	49.855.650,00	20,74%
5.02	Belanja Jasa	544.142.920,00	481.821.500,00	88,55%
5.02	Belanja Jasa Kantor	517.892.920,00	455.646.500,00	87,98%
5.02	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	4.075.920,00	1.498.500,00	36,76%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Lembur	513.817.000,00	454.148.000,00	88,39%
5.02	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	26.175.000,00	99,71%
5.02	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.250.000,00	26.175.000,00	99,71%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	93.139.648,00	84,67%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.000.000,00	93.139.648,00	84,67%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.000.000,00	93.139.648,00	84,67%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.000.000,00	274.600.000,00	99,85%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	275.000.000,00	274.600.000,00	99,85%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor	275.000.000,00	274.600.000,00	99,85%
5.02	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	275.000.000,00	274.600.000,00	99,85%
5.02	Penilaian Barang Milik Daerah	279.856.000,00	110.188.000,00	39,37%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	279.856.000,00	110.188.000,00	39,37%
5.02	Belanja Barang	44.856.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	44.856.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	612.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.180.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	35.064.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	110.188.000,00	55,09%
5.02	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	110.188.000,00	55,09%
5.02	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban	200.000.000,00	110.188.000,00	55,09%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

	Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.176.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	23.176.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang	12.676.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	12.676.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	612.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.064.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00	-	0,00%
5.02	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11.985.600,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	11.985.600,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang	11.985.600,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	11.985.600,00	-	0,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.224.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.097.600,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.664.000,00	-	0,00%
5.02	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	78.198.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	78.198.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang	8.596.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	8.596.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.120.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.476.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	69.602.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa Kantor	69.602.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Lembur	69.602.000,00	-	0,00%
5.02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	167.472.800,00	72.202.000,00	43,11%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	167.472.800,00	72.202.000,00	43,11%
5.02	Belanja Barang	48.396.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	48.396.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.120.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000.000,00	-	0,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.276.800,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	84.076.000,00	72.202.000,00	85,88%
5.02	Belanja Jasa Kantor	84.076.000,00	72.202.000,00	85,88%
5.02	Belanja Lembur	84.076.000,00	72.202.000,00	85,88%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000,00	-	0,00%
5.02	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	276.519.000,00	215.055.600,00	77,77%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	276.519.000,00	215.055.600,00	77,77%
5.02	Belanja Barang	16.779.000,00	16.605.600,00	98,97%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	16.779.000,00	16.605.600,00	98,97%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.779.000,00	16.605.600,00	98,97%
5.02	Belanja Jasa	259.740.000,00	198.450.000,00	76,40%
5.02	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	35.100.000,00	70,91%
5.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.500.000,00	35.100.000,00	70,91%
5.02	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	88.000.000,00	41.250.000,00	46,88%
5.02	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	88.000.000,00	41.250.000,00	46,88%
5.02	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.240.000,00	122.100.000,00	99,89%
5.02	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	122.240.000,00	122.100.000,00	99,89%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.595.605.000,00	4.006.735.150,00	87,19%
5.02	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.595.605.000,00	4.006.735.150,00	87,19%
5.02	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	700.400.000,00	645.089.450,00	92,10%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	510.400.000,00	460.089.450,00	90,14%
5.02	Belanja Barang	510.400.000,00	460.089.450,00	90,14%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	510.400.000,00	460.089.450,00	90,14%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.270.000,00	99.345.000,00	77,45%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.360.000,00	17.704.500,00	96,43%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	363.770.000,00	343.039.950,00	94,30%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	185.000.000,00	97,37%
5.02	Belanja Modal Komputer	190.000.000,00	185.000.000,00	97,37%
5.02	Belanja Modal Komputer Unit	190.000.000,00	185.000.000,00	97,37%
5.02	Belanja Modal Komputer Jaringan	190.000.000,00	185.000.000,00	97,37%
5.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	535.200.000,00	519.818.250,00	97,13%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	535.200.000,00	519.818.250,00	97,13%
5.02	Belanja Barang	255.690.000,00	248.782.250,00	97,30%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	255.690.000,00	248.782.250,00	97,30%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	725.000,00	725.000,00	100,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.735.000,00	6.687.750,00	99,30%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	243.130.000,00	236.374.500,00	97,22%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.100.000,00	4.995.000,00	97,94%
5.02	Belanja Jasa	279.510.000,00	271.036.000,00	96,97%
5.02	Belanja Jasa Kantor	279.510.000,00	271.036.000,00	96,97%
5.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	3.600.000,00	33,33%
5.02	Belanja Lembur	268.710.000,00	267.436.000,00	99,53%
5.02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	995.203.000,00	902.055.200,00	90,64%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	995.203.000,00	902.055.200,00	90,64%
5.02	Belanja Barang	659.213.000,00	634.228.500,00	96,21%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	659.213.000,00	634.228.500,00	96,21%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.388.000,00	1.240.000,00	89,34%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	253.900.000,00	236.374.500,00	93,10%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	175.050.000,00	173.160.000,00	98,92%
5.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.875.000,00	208.469.000,00	97,47%
5.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90%
5.02	Belanja Jasa	335.990.000,00	267.826.700,00	79,71%
5.02	Belanja Jasa Kantor	116.084.000,00	110.104.000,00	94,85%
5.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.200.000,00	35.220.000,00	85,49%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Lembur	49.884.000,00	49.884.000,00	100,00%
5.02	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.406.000,00	37.597.700,00	66,66%
5.02	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.200.000,00	2.000.000,00	19,61%
5.02	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.934.000,00	7.492.500,00	62,78%
5.02	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.272.000,00	28.105.200,00	82,01%
5.02	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	19.250.000,00	80,21%
5.02	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.000.000,00	19.250.000,00	80,21%
5.02	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	139.500.000,00	100.875.000,00	72,31%
5.02	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	139.500.000,00	100.875.000,00	72,31%
5.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	136.726.000,00	135.000.000,00	98,74%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.726.000,00	95.000.000,00	98,22%
5.02	Belanja Modal Komputer	96.726.000,00	95.000.000,00	98,22%
5.02	Belanja Modal Komputer Unit	96.726.000,00	95.000.000,00	98,22%
5.02	Belanja Modal Komputer Jaringan	96.726.000,00	95.000.000,00	98,22%
5.02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	251.125.000,00	242.593.400,00	96,60%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Barang dan Jasa	251.125.000,00	242.593.400,00	96,60%
5.02	Belanja Barang	120.575.000,00	112.043.400,00	92,92%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	120.575.000,00	112.043.400,00	92,92%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.865.000,00	14.696.400,00	87,14%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.295.000,00	51.004.500,00	90,60%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.215.000,00	36.352.500,00	97,68%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.200.000,00	9.990.000,00	97,94%
5.02	Belanja Jasa	130.550.000,00	130.550.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Kantor	130.550.000,00	130.550.000,00	100,00%
5.02	Belanja Lembur	130.550.000,00	130.550.000,00	100,00%
5.02	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	828.818.000,00	757.500.000,00	91,40%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	795.700.000,00	757.500.000,00	95,20%
5.02	Belanja Barang	155.700.000,00	123.500.000,00	79,32%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	155.700.000,00	123.500.000,00	79,32%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	155.700.000,00	123.500.000,00	79,32%
5.02	Belanja Jasa	600.000.000,00	594.000.000,00	99,00%
5.02	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	600.000.000,00	594.000.000,00	99,00%
5.02	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	600.000.000,00	594.000.000,00	99,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.118.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	33.118.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Modal Alat Ukur	33.118.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	33.118.000,00	-	0,00%
5.02	Penagihan Pajak Daerah	372.501.200,00	206.012.000,00	55,31%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	372.501.200,00	206.012.000,00	55,31%
5.02	Belanja Barang	275.509.200,00	159.020.000,00	57,72%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	275.509.200,00	159.020.000,00	57,72%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.600.000,00	35.520.000,00	58,61%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	124.480.000,00	123.500.000,00	99,21%
5.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.429.200,00	-	0,00%
5.02	Belanja Jasa	46.992.000,00	46.992.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Kantor	46.992.000,00	46.992.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	46.992.000,00	46.992.000,00	100,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	-	0,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	561.191.800,00	394.655.000,00	70,32%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	561.191.800,00	394.655.000,00	70,32%
5.02	Belanja Barang	110.000.800,00	33.300.000,00	30,27%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	110.000.800,00	33.300.000,00	30,27%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	110.000.800,00	33.300.000,00	30,27%
5.02	Belanja Jasa	451.191.000,00	361.355.000,00	80,09%
5.02	Belanja Jasa Kantor	451.191.000,00	361.355.000,00	80,09%
5.02	Belanja Lembur	451.191.000,00	361.355.000,00	80,09%
5.02	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	214.440.000,00	204.011.850,00	95,14%
5.02	Belanja Barang dan Jasa	214.440.000,00	204.011.850,00	95,14%
5.02	Belanja Barang	34.440.000,00	24.975.000,00	72,52%
5.02	Belanja Barang Pakai Habis	34.440.000,00	24.975.000,00	72,52%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.320.000,00	-	0,00%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.120.000,00	9.990.000,00	76,14%
5.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90%
5.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50%
5.02	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50%
5.02	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.02	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

5.02	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	79.536.850,00	99,42%
5.02	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	79.536.850,00	99,42%
5.02	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	80.000.000,00	79.536.850,00	99,42%
JUMLAH		6.430.341.804.310,00	6.282.915.333.872,00	97,71%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2021 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78
Realisasi Belanja Tahun 2021-2024

No	Tahun	Realisasi Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	Capaian%
1	2021	2.302.605.005.145,56	2.060.057.230.721,51	89,47%
2	2022	2.560.325.720.124,00	2.276.772.829.461,48	88,93%
3	2023	2.597.099.755.838,00	2.465.601.699.084,13	94,94%
4	2024	2.947.435.592.653,00	2.657.709.012.035,00	90,17%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun baik dari segi anggaran maupun pendapatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun pada umumnya.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dan capaiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan/ dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2026 yaitu terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dengan sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparansi.

Sedangkan kebijakan yang ditentukan untuk mencapai sasaran dengan melaksanakan sebagai berikut:



1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan wajib pajak daerah;
2. Mengoptimalkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelayanan prima pengelolaan keuangan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah);
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan daerah.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur yang ada;
2. Kapabilitas sumber daya aparatur yang masih terbatas;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang;
4. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Perpajakan Daerah;

Strategi pemecahan masalah/langkah-langkah yang telah dilaksanakan:

1. Optimalisasi kebutuhan aparatur guna menunjang kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan



sesuai dengan kebutuhan organisasi;

3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
4. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD pajak daerah;

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan jumlah ASN yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
2. Peningkatan Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selama tahun 2024, sehingga beberapa program/ kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara lebih efisien. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2024 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana-rencana kerja berikutnya, yaitu :

1. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala;
2. Melakukan koordinasi internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun maupun koordinasi eksternal dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, maupun pihak-pihak terkait lainnya



dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan;

3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber- sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Mewujudkan adanya aparat yang profesional, dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
5. Meningkatkan pengembangan basis data potensi-potensi pendapatan, karena dengan data actual dan akurat maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**FRANS NOVENDY SARAGIH,S.STP,M.Si
NIP. 1981 1101 2000 12 1 001**